

**DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK LOKAL DAN
PARTAI POLITIK NASIONAL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh:

IRPANNUSIR
NPM : 1820040025P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Irpannusir
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820040025P
Program Studi/Konsentrasi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal
Dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Sidang Tesis

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

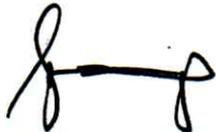
UMSU

Medan, 28 Februari 2020

Komisi Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing I



Dr. Drs. Iskandar Zulkarnain, M.Si.

Pembimbing II



Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D.

PENGESAHAN

**DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK LOKAL DAN
PARTAI POLITIK NASIONAL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH**

IRPANNUSIR

1820040025P

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

**“Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk
oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar

Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)

Pada Hari Jumat Tanggal 28 Februari 2020”

Panitia Penguji

1. **Dr. Drs. Iskandar Zulkarnain, M.Si.** 1.....
Ketua
2. **Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D.** 2.....
Sekretaris
3. **Dr. Arifin Saleh, MSP.** 3.....
Anggota
4. **Dr. Yan Hendra, M.Si.** 4.....
Anggota
5. **Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom.** 5.....
Anggota

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK LOKAL DAN PARTAI POLITIK NASIONAL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 28 Februari 2020
Peneliti,




IRPANNUSIR
1820040025P

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRPANNUSIR
NPM : 1820040025P
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eklusif (*Non Exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 28 Februari 2020
Yang Menyatakan,




(IRPANNUSIR)

DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK LOKAL DAN PARTAI POLITIK NASIONAL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

ABSTRAK

Keberadaan partai politik lokal yang berbarengan dengan partai nasional membatasi ruang gerak partai lokal di Aceh untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai legislatif yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini juga ada kaitannya dengan konteks kewenangan otonomi khusus yang diberikan. Secara tidak langsung, pemerintah pusat masih melakukan intervensi sebagai bentuk monitoring agar stabilitas pemerintahan di Aceh tetap terjadi, mengingat pernah terjadinya konflik di Aceh. Kondisi ini menumbuhkan dinamika komunikasi antara partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk mengungkapkan pengalaman sebagai pelaku politik partai lokal dan partai nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lebih dari satu periode. Hasil penelitian menunjukkan, perbedaan kelompok partai membuat komunikasi diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terbatas. Dimana mereka yang berasal dari Partai nasional tidak akan memasukkan diri untuk melakukan komunikasi terhadap persoalan lokal. Sebaliknya, mereka yang berasal dari partai lokal akan menarik diri untuk membahas persoalan dengan ruang lingkup nasional. Akibatnya, diantara kedua kelompok partai kurang menimbulkan kepekaan, solidaritas, keterbukaan dan kerjasama tidak berjalan dengan maksimal. Perbedaan kelompok partai yang ada dipahami oleh masing-masing kelompok partai sebagai bentuk kompetisi bukan sebagai koalisi yang berpikir untuk membangun Aceh secara bersama. Masing-masing kelompok partai merasa benar dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lain yang berlainan kelompok, atau disebut dengan pandangan apriori. Kondisi seperti ini terus dipertahankan dalam setiap periode pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hambatan ini disebut dengan hambatan perilaku.

Kata Kunci: Dinamika Komunikasi, Partai Politik Lokal, Partai Politik Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

COMMUNICATION DYNAMICS BETWEEN LOCAL POLITICAL PARTIES AND NATIONAL POLITICAL PARTIES IN ACEH HOUSE OF REPRESENTATIVES

ABSTRACT

The existence of local political parties in unison with national parties limits the space for local parties in Aceh to carry out their functions as legislative which has been regulated in Law (Law) Number 11 of 2006 concerning the Law on Government of Aceh (UUPA). This also has to do with the context of the special autonomy authority granted. Indirectly, the central government is still intervening as a form of monitoring so that the stability of governance in Aceh continues to occur, given the conflict in Aceh. This condition fosters the dynamics of communication between local political parties and national political parties in the Aceh House of Representatives. This research uses descriptive method with a qualitative approach. There were 4 informants in this study, who were chosen based on their willingness to express their experiences as political parties in local and national parties in the Aceh House of Representatives for more than one period. The results showed that differences in party groups made communication among members of the Aceh House of Representatives limited. Where those from the national party will not enter themselves to communicate with local problems. On the contrary, those from local parties will withdraw to discuss issues with a national scope. As a result, the two parties' groups lack sensitivity, solidarity, openness, and cooperation does not run optimally. The differences in the existing party groups are understood by each party group as a form of competition not as a coalition that is thinking about building Aceh together. Each party group felt right and did not want to listen to the explanation of other members of the Aceh House of Representatives who were of different groups, or called apriori views. Such conditions continue to be maintained in each election period for members of the Aceh House of Representatives. These barriers are called behavioral barriers.

Keywords: Communication Dynamics, Local Political Parties, National Political Parties, Aceh House of Representatives.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, khususnya peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis berjudul “Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh” yang dipaparkan dalam seminar hasil tesis di hadapan dosen pembimbing, dosen penguji dan kepada tamu undangan. Tidak tertinggal juga *Shalawat* dan salam kepada baginda Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatka syafa'atnya di hari kemudian.

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti membuka ruang kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar peneliti dapat menyempurnakan tesis ini. Penelitian ini tidak akan selesai jika tidak atas restu dan doa kedua orangtua yang peneliti cintai dan kagumi, Ayah Rasyidin dan Ibu Sarimani. Karena doa kalian, peneliti diberi kemudahan dalam segala hal dan selalu menikmati seperti sekarang. Terimakasih untuk istri peneliti Defi Cintia Dewi dan mertua peneliti Ayah Ngatimi dan Ibu Roswati yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk tetap bisa menimba ilmu lagi dan mampu menyelesaikan tugas akhir peneliti. Terimakasih juga untuk anak-anak peneliti Givon Hari Lucky Irfan,

Dayyan Al Gafar Irfan dan Balqis Rayyana Irfan, yang terus menjadi penyemangat peneliti dalam melakukan hal-hal positif.

Terimakasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M. AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Ibu Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus dosen pembimbing II yang selalu memberi motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Muhammad Thariq S.Sos., M.I.Kom sebagai Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang selalu hadir dalam setiap sesi seminar hingga sidang tesis peneliti.
5. Bapak Dr. Drs. Iskandar Zulkarnain., M.Si sebagai penguji I yang selalu baik menerima komunikasi dan kehadiran peneliti untuk mendapat masukan positif terkait hasil penelitian ini.
6. Bapak Dr. Arifin Saleh, MSP sebagai dosen penguji yang telah memberi koreksi untuk menjadikan penelitian ini lebih baik.
7. Bapak Dr. Yan Hendra, M.Si sebagai dosen penguji yang memberi masukan positif untuk peneliti.

8. Bapak Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom sebagai dosen penguji yang membantu peneliti memahami variabel penelitian secara baik.
9. Rekan-rekan satu stambuk yang sudah lulus dan rekan-rekan stambuk 2017 Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UMSU yang memberikan semangat baru kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Segenap civitas akademik yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian sampai dengan pelaksanaan sidang tesis.

Peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan namanya tidak bisa disebut satu persatu dalam kata pengantar ini. Serta, permohonan maaf atas kesalahan baik yang disengaja, tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung yang peneliti lakukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 28 Februari 2020



Irpannusir

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Batasan Masalah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Komunikasi.....	8
2.1.1. Unsur-unsur Komunikasi.....	10
2.1.2. Bentuk-bentuk Komunikasi.....	11
2.1.3. Hambatan-hambatan Komunikasi.....	13
2.2. Komunikasi politik.....	15
2.3. Partai politik.....	24
2.3.1. Partai Politik Lokal.....	27
2.3.2. Partai Politik Nasional.....	28
2.4. Dinamika Komunikasi.....	29
2.5. Kajian Penelitian Terdahulu.....	31
2.6. Kerangka Berpikir.....	43
2.7. Kategorisasi Penelitian.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Paradigma Penelitian.....	47
3.2. Metode Penelitian.....	48
3.3. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
3.4. Informan.....	49

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	50
2. Observasi.....	51
3.6. Teknik Analisis Data.....	52
3.7. Keabsahan Data.....	54
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	55
3.8.2. Waktu Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Hasil Penelitian.....	56
4.1.1. Gambaran umum.....	56
4.1.2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	57
4.1.3. Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal dan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	61
4.1.4. Hambatan Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal dan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	74
4.2. Pembahasan.....	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Simpulan.....	98
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Komunikasi Harold Lasswell.....	9
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	44
Gambar 4.1. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	58
Gambar 4.2. Perolehan Suara Legislatif Wilayah Pemilihan Provinsi Aceh.....	91
Gambar 4.3. Mode Dinamika Komunikasi Partai Lokal dan Partai Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian.....	45
Tabel 4.1. Raqan Prolega Prioritas dan Qanun Disahkan Tahun 2014- 2019.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip wawancara
2. Dokumentasi
3. Berita Acara Sidang Tesis
4. Surat Izin Penelitian
5. Biodata Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komunikasi menjadi cara bagi seseorang untuk menyatakan apa yang dibutuhkan agar orang lain tahu dan memberikan efek dari tujuan yang diinginkan. Seperti yang diutarakan oleh Carl. I. Hovland (Mulyana, 2010: 68), bahwa komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).

Lebih luas, Susanto (2010: 6-12) membedakan komunikasi menjadi lima bentuk yaitu, komunikasi interpersonal (*intrapersonal communication*), komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*). Dari lima bentuk komunikasi tersebut, komunikasi dapat dibedakan menjadi berbagai jenis. Salah satunya komunikasi politik.

Komunikasi politik sendiri merupakan komunikasi yang erat kaitannya dengan pesan bermuatan politik. Sebab, komunikasi politik (Nimmo, 2007: 8) adalah komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa dengan melakukan komunikasi maka segala gagasan, ide, informasi maupun pesan-pesan politik dapat disampaikan, diterima dan mendapat

Efek dari individu maupun kelompok lain yang merupakan komunikasi politik yang ditargetkan. Dalam komunikasi politik, juga terdapat sebuah dinamika. Yaitu semacam hubungan sebab akibat dari interaksi dalam komunikasi politik yang dilakukan, perkembangannya dan penyelesaian dari hubungan sebab akibat tersebut. Atau dengan kata lain, dapat diartikan bahwa dinamika merupakan pergerakan arus pesan politik yang terjadi.

Salah satu dinamika komunikasi yang ada, dapat dilihat dari partai lokal dan partai nasional yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dinamika komunikasi yang ada bermula saat pergolakan konflik bersenjata berakhir secara demokratis. Tepatnya setelah ditandatanganinya kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang disebut dengan MoU Helsinki. Tindak lanjut dari kesepakatan damai diwujudkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Secara khusus undang-undang tersebut lahir sebagai suatu bentuk kebijakan nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesuai dengan kerangka MoU Helsinki, kondisi ini tentu saja bisa dimaknai sebagai penguatan demokratisasi di Indonesia khususnya di Aceh, karena menyelesaikan konflik Aceh tanpa menggunakan kekuatan militer.

Perjalanannya, kondisi sosial politik di Aceh pun kian dinamis ketika memasuki pemilu pada tahun 2006, pemilu pertama pasca konflik ini berjalan dengan sangat terbuka dan memberikan dinamika yang unik dalam proses

demokratisasi di Aceh, kerana pada saat pemilukada yang diselenggarakan Desember 2006 ini pula calon perseorangan dari jalur independen untuk pertama kalinya diperbolehkan ikut bertarung dalam pilkada di Indonesia. Penyelenggaraan pemilukada pun berjalan sangat terbuka dan demokratis, tentu saja memberikan ruang kepada partai politik nasional dan calon perseorangan yang berasal dari eks-kombatan untuk ikut berkompetisi menjadi calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil gubernur. Dan kepercayaan masyarakat terhadap para calon perseorangan yang berasal eks-kombatan sangat besar, hal ini terbukti hampir semua calon perseorangan yang berasal dari eks-kombatan menang di 17 kabupaten kota serta provinsi (Bhakti, 2008: 35).

Partisipasi politik rakyat Aceh semakin mencuat ketika memasuki pemilu tahun 2009 yang lalu, pada saat pemilu tahun 2009 tranformasi politik Aceh sangat panas karena ketatnya persaingan antara partai politik nasional dengan partai lokal dalam memperebutkan simpati dan empati rakyat. Antusiasme rakyat Aceh untuk mendukung Partai Lokal khususnya Partai Aceh sangat besar, hal ini dapat dilihat ketika kampanye Partai Aceh mampu mengkonsolidasi ribuan masyarakat sipil dan terbukti secara demokratis Partai Aceh menang pada saat pemilu dengan perolehan suara mencapai 48,78 % keberhasilan Partai Aceh dalam memenangi pemilu tahun 2009 yang lalu telah mendudukan 33 kader terbaiknya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sedangkan di tingkat kabupaten/ kota Partai Aceh menguasai 237 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 21 kabupaten/ kota di Aceh.

Keberhasilan Partai Aceh memenangkan pemilu 2019 yang lalu menunjukkan bahwa dukungan rakyat Aceh kepada Partai Aceh yang kebanyakan berasal dari eks- kombatan sangat kuat, namun sayang dukungan masyarakat yang sangat kuat ini tidak menjadikan Partai Aceh tetap solid dalam memperjuangkan kewenangan Aceh yang telah di atur dalam UUPA, tetapi terlihat bahwa kader Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum menunjukkan kemajuan dalam melakukan komunikasi politik secara efektif dengan partai nasional lainnya untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki. Ironinya, partai politik lokal tersebut sering terjebak pada berbagai persoalan yang pragmatis yang sempit dan kemudian berakibat pada terjadinya keretakan dan kecemburuan antara sesama eks-kombatan.

Pemerintah pusat memiliki kepentingan kuat terhadap Aceh dalam bentuk apa pun, maka dibutuhkan pihak yang bisa memfasilitasi. Parnaslah yang hanya bisa memfasilitasi kepentingan pusat ke Aceh. Tidak hanya itu saja tujuan dari parnas dan parlok. Keduanya ingin menurunkan kekuatan serta pengaruh politik kandidat independen, bilamana tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu.

Partai nasional dan lokal peserta Pemilu 2019 di Aceh diharapkan mampu menjalin komunikasi yang lebih terbuka dan efektif dengan komitmen menegakkan demokrasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran partai nasional dan partai lokal di Aceh seyogyanya mampu memajukan Aceh melalui pembentukan pemerintahan yang lebih baik, transparan, bersih dan bertanggung jawab serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,

terutama ketika mereka telah masuk ke gedung dewan perwakilan rakyat Aceh. Persoalan-persoalan seperti bahasa yang digunakan ketika sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, masalah busana muslim/muslimah, atribut dan lambang daerah, masalah Wali Nanggroe dan seterusnya memicu perdebatan sengit dari kubu nasionalis, Islamis dan lokalis (partai lokal vs partai nasional) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Secara sederhananya, dapat dianalogikan ketika dalam kontestasi pemilu parlok dan parnas tidak mampu membuktikan komunikasi politik yang terbuka, adil, demokratis dan bertanggung jawab, tentunya kenyataan tersebut akan berlanjut lebih sengit lagi ketika mereka berada di dalam parlemen atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terhormat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dinamika komunikasi antara partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dinamika komunikasi antara partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sejak diberlakukannya UUPA Nomor 11 Tahun 2006.

2. Untuk menganalisis hambatan dinamika komunikasi politik antara partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan konsep, teori-teori dan cara pandang baru pemikiran di bidang dinamika komunikasi politik antara parlok dan parnas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan segala kelebihan dan kelemahannya.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan dalam dunia komunikasi khususnya dalam persoalan dinamika komunikasi partai politik partai lokal dan partai nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan akademisi, praktisi, partai lokal dan partai nasional, berbagai komponen masyarakat serta elit kekuasaan di Aceh guna memberi solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat Aceh melalui komunikasi politik para utusan parlok dan parnas yang terhimpun di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam mengaktualisasikan ketiga fungsi yang ada, yaitu fungsi legislasi, fungsi

Pengawasan dan Fungsi Penganggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Aceh.

1.5. Batasan Masalah

Guna memfokuskan penelitian, maka peneliti membuat batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Partai lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).
2. Partai nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Partai Gerindra dan PKS.

BAB II

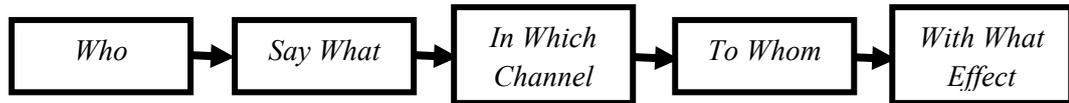
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai sebuah proses penyampaian pesan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan, tatap muka maupun melalui perantara dengan tujuan terciptanya kesamaan makna. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) (2001: 79) komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Gerald R. Miller (Mulyana, 2002: 62) menjelaskan pengertian komunikasi sebagai bentuk penyampaian pesan dari sumber kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Everest M. Rogers (Tisnawati, 2005: 295) juga mengemukakan pedapatnya dengan mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka.

Pemahaman komunikasi yang sederhana dan mudah untuk dipahami adalah teori milik Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*. Ia mengemukakan bahwa komunikasi (Effendy, 2005: 10) adalah *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Pengertian komunikasi seperti yang diutarakan Laswell dapat digambarkan dalam model sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model komunikasi Harold Lasswell (Effendy, 2005: 10).

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator. Yaitu, pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. *Say what* dapat dipahami sebagai apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. apa yang akan disampaikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat simbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. *In which channel* adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik). *To whom* adalah penerima pesan. Siapa saja dapat menjadi komunikan, baik individu, kelompok, organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, penyandi balik (*decoder*). Terakhir adalah *with what effect* atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari komunikator, misalnya perubahan sikap, tingkah laku atau bertambahnya pengetahuan.

2.1.1. Unsur-unsur Komunikasi

Melalui beberapa definisi mengenai komunikasi, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang membangun sebuah komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Komunikator.**

Komunikator merupakan orang yang membuat keputusan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain.

2. **Komunikan**

Komunikan adalah orang yang menerima pesan.

3. **Pesan**

Pesan adalah makna yang ingin disampaikan oleh komunikator baik berbentuk lambang-lambang, tulisan maupun isyarat tertentu yang kemudian disebut sebagai bahasa verbal maupun bahasa non verbal.

4. **Saluran**

Saluran merupakan tempat untuk menyampaikan pesan agar sampai kepada komunikan. Dalam komunikasi sederhana, saluran yang dimaksud seperti udara.

5. **Efek**

Efek merupakan umpan balik dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Efek ini bisa berupa perubahan sikap maupun perilaku.

2.1.2. Bentuk-bentuk Komunikasi

Komunikasi (Susanto, 2010: 6-12) dapat dibedakan menjadi lima bentuk, yaitu komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*), komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*).

1. Komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*)

Komunikasi intrapribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Komunikasi semacam ini berupa proses pemahaman, ingatan dan interpretasi terhadap simbol yang ditangkap melalui panca indera, dan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

2. Komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*)

komunikasi antarpribadi merupakan proses komunikasi antara satu orang dengan orang lain secara timbal balik dalam menciptakan makna. Dengan kata lain, komunikasi antarpribadi merupakan proses penyampaian pesan perorangan waktu ke waktu, berulang kali, bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa media, ataupun langsung melalui media.

3. Komunikasi kelompok (*group communication*)

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi sekumpulan orang yang mempunya tujuan bersama. Komunikasi semacam ini menitikberatkan pembahasan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok. Komunikasi kelompok dibedakan lagi dalam dua bentuk. Yaitu, komunikasi kelompok kecil (*small group communication*) dan komunikasi kelompok besar (*large group communication*).

Komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi berlangsung secara tatap muka, dan tidak ada batas yang menentukan secara tegas berapa jumlah peserta kelompok yang ikut berkomunikasi. Minimal 2-3 orang peserta, bahkan ada yang mengembangkan sampai 20 atau 30 orang. Namun, tidak melebihi 50 orang. Adapun ciri-ciri dari kelompok kecil adalah sebagai berikut:

1. Suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain
2. Memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain
3. Berinteraksi untuk beberapa tujuan
4. Mengambil peranan
5. Terikat satu sama lain, dan
6. Berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu dari komponen itu hilang, individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil.

Komunikasi kelompok besar (*large group communication*), merupakan komunikasi yang dilakukan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi kelompok kecil. Pada situasi seperti itu, para komunikan menerima pesan yang disampaikan komunikator bersifat emosional.

4. Komunikasi massa (*mass communication*)

Komunikasi massa (*mass communication*) yakni komunikasi dengan menggunakan saluran media massa. Komunikasi semacam ini menitikberatkan pada struktur media, hubungan media dan masyarakat, hubungan antara media

dan khalayak, aspek budaya dari komunikasi massa serta dampak hasil komunikasi massa terhadap individu.

2.1.3. Hambatan-hambatan Komunikasi

Komunikasi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang dapat menyebabkan komunikasi menjadi terganggu. Faktor penghambat komunikasi dapat dibedakan menjadi tiga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Wursanto, 2002: 171) :

1. Hambatan teknis

Hambatan teknis merupakan hambatan yang disebabkan oleh faktor berupa sarana dan sarana yang kurang saat melakukan proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak sesuai dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya komunikasi.

2. Hambatan semantik

Hambatan semantik merupakan hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberi pengertian terhadap bahasa (kata-kata, kalimat atau kode) yang digunakan saat berkomunikasi.

3. Hambatan perilaku

Hambatan perilaku adalah hambatan berupa pandangan yang bersifat apriori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah dan sifat yang egosentris.

Hambatan komunikasi juga disampaikan oleh Cangara (2004: 131).

Hambatan-hambatan tersebut adalah hambatan teknis, hambatan semantik,

hambatan psikologis, hambatan fisik atau organik, hambatan status, hambatan kerangka pikir, dan hambatan budaya.

1. Hambatan teknis

Hambatan teknis adalah hambatan yang berasal dari hal-hal bersifat teknis seperti jaringan telepon yang terputus, matinya jaringan internet dan sebagainya.

2. Hambatan semantik

Hambatan semantik merupakan hambatan yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang salah saat berkomunikasi seperti penggunaan bahasa asing yang sulit dipahami.

3. Hambatan psikologis

Hambatan psikologis adalah hambatan yang terjadi akibat persoalan dalam diri. Contohnya seperti rasa cemas, sedih, senang, atau kondisi kejiwaan yang terganggu.

4. Hambatan fisik atau organik

Hambatan fisik atau organik adalah hambatan yang terjadi karena letak geografis seperti jarak tempuh yang jauh sehingga komunikasi yang sulit dilakukan.

5. Hambatan status

Hambatan status merupakan hambatan yang terjadi karena perbedaan status sosial serta senioritas.

6. Hambatan pikir

Hambatan berpikir merupakan hambatan yang terjadi karena perbedaan pola pikir antar individu. Perbedaan pola pikir ini bisa disebabkan adanya pengalaman serta latar belakang pendidikan yang berlainan.

7. Hambatan budaya

Hambatan budaya merupakan hambatan yang disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan serta nilai-nilai yang dianut individu.

2.2. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya, dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 2010:152). Komunikasi politik (Rush, 2008: 24) juga dapat diartikan sebagai proses informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Proses komunikasi politik berkesinambungan dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua lapisan masyarakat. Komunikasi politik tidak sekadar mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-

pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka, komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik, komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik.

Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti (Harun dan Sumarno, 2006: 3). Sementara itu, Alfian (1991: 5) mengemukakan komunikasi politik ialah suatu disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, dari berbagai definisi tersebut terlihat bahwa komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.

Unsur pokok komunikasi politik meliputi: komunikator politik, komunikan, isi komunikasi (pesan-pesan), media komunikasi, tujuan komunikasi, sumber dan efek. Komunikator politik pun bisa menunjuk pada badan atau institusi (Harun dan Sumarno, 2006: 6). Peran Komunikator politik menjadi sangat penting. Dan Nimmo menggaris bawahi, komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, dalam proses opini publik. Dia mengidentifikasi mereka berdasarkan kedudukan dalam masyarakat menjadi tiga kategori yaitu politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (Nimmo, 1978: 16).

Sedangkan, pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis, secara verbal maupun non verbal, tersembunyi atau terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

Selanjutnya, saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Saluran atau media yang digunakan bentuknya bisa beraneka ragam: media massa: cetak, elektronik. Serta bisa pula menggunakan media teknologi informasi: *internet, face book* dan sebagainya. Di luar media, berbagai saluran komunikasi lainnya seperti saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi publik, saluran komunikasi sosial. Saluran komunikasi kelompok misalnya, partai politik, (DPP, DPW, DPD, DPC, DPAC), organisasi profesi, ikatan alumni, organisasi sosial keagamaan, karangtaruna, kelompok pengajian, kelompok tani dan nelayan, koperasi, dan sebagainya. Sedangkan saluran komunikasi publik misalnya, aula, balai desa, alun-alun, dan sebagainya. Dan saluran komunikasi sosial misalnya pesta perkawinan, acara arisan, dan sebagainya. Sedangkan sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Terakhir, Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, yang nuansanya bermuara pada pemberian suara (*vote*) dalam pemilihan umum (Cangara, 2009: 33).

Sebagaimana telah dikemukakan, komunikator politik menyangkut tiga kategori politikus, profesional, dan aktivis. *Pertama*: Politikus Sebagai komunikator Politik. Daniel Katz membedakan politikus ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber perjuangan kepentingan politikus pada proses politik yaitu politikus ideolog (negarawan), serta politikus partisan.

- (1). Politikus ideolog adalah orang-orang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik.
- (2). Politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seorang langganan atau kelompoknya (Nimmo, 1978: 12).

Kedua: Profesional sebagai komunikator politik. Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, karena keahliannya berkomunikasi. James Carey (Dann Nimmo, 1978) mengatakan komunikator profesional adalah makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah komunitas.

Ketiga, Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Aktivis bisa dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, *jurubicara* dan *pemuka pendapat* yang bergerak dalam jaringan interpersonal.

Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo (1996: 26) menegaskan ada empat komponen yang

harus ada pada komunikator politik, yaitu *communicator credibility*, *communicator attractiveness*, *communicator similarity* dan *communicator power*. Pertama, kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Kredibilitas mencakup keahlian sumber (*source expertise*) dan kepercayaan sumber (*source trustworthiness*). Kedua, daya tarik. Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya. Ketiga, kesamaan. Sumber disukai oleh *audience* bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan. Dari kacamata *audience* maka sumber tersebut adalah sumber yang menyenangkan (*source likeability*), yang maksudnya adalah perasaan positif yang dimiliki konsumen (*audience*) terhadap sumber informasi. Terakhir, *Power*. Sumber yang mempunyai *power*, menurut Petty dan Cacioppo, lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya daripada tidak mempunyai *power*.

Ada dua faktor penunjang yang harus diperhatikan pula oleh komunikator. Dua faktor tersebut adalah keterlibatan sumber dan kepentingan isu bagi penerima. Keterlibatan yang tinggi menghasilkan efektivitas pesan yang tinggi pula, dan isu yang semakin dekat dengan kepentingan penerima, biasanya akan lebih mendorong efektivitas pesan.

Komunikasi politik yang dilakukan memiliki pola. Hamad, (2004: 41) menyebut ada empat pola komunikasi politik, yaitu:

1. Pola komunikasi vertikal (*top down*, dari pemimpin kepada yang dipimpin), biasanya pola ini terjadi bila partai memposisikan pemimpin adalah instruksi dalam kelompok atau organisasi. Pola ini sering menunggu perintah dari atasan atau pemimpin partai. Para pengikut akan mengartikan simbol yang digunakan baik simbol verbal maupun simbol nonverbal.
2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok), pola komunikasi seperti ini terjadi dalam kelompok dimana interaksi terjadi antara individu didalam kelompok. Komunikasi yang dijadikan topik terfokus kepada membahas perintah atau instruksi pimpinan.
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal), pola komunikasi formal muncul dalam rapat-rapat anggota, rapat pimpinan atau pertemuan musyawarah partai, dan lain sebagainya.
4. Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi); pola ini di kembang dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya kelompok peduli yang memikirkan pengembangan partai atau kelangsungan sebuah visi atau misi organisasi sebuah partai.

Menurut Nimmo (2005: 28), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola komunikasi politik, yaitu:

1. Faktor fisik (alam). Faktor ini berkaitan dengan tempat dimana komunikasi berlangsung, bila pertemuan di tempat yang jauh dari keramaian akan berbeda dengan di tempat yang dekat dengan keramaian.
2. Faktor teknologi. Faktor ini berhubungan dengan penggunaan alat teknologi seperti sarana presentasi (Laptop dan LCD); handpone, ketercapaian akses internet.
3. Faktor ekonomis. Faktor ini berkaitan dengan pembiayaan atau efisiensi waktu yang dihubungkan dengan penggunaan dana.
4. Faktor sosiokultural (pendidikan, budaya). Faktor ini terkait dengan keadaan manusia yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki serta penghayatan atau pelaksanaan sebuah budaya yang melekat sebagai sebuah kepribadian pada seorang individu.
5. Faktor politis. Faktor ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat secara menyeluruh.

Melakukan komunikasi politik juga dapat menggunakan saluran. Saluran Komunikasi Politik (Venus, 2004: 31), yang sering dipakai oleh para pelaku politik antara lain:

1. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media massa baik tercetak maupun media elektronik audio seperti radio atau audio-visual seperti televisi atau film.

2. Komunikasi tatap muka yaitu dalam rapat umum, konferensi pers, dan Komunikasi berperantara yaitu ada perantara antara komunikator dan khalayak, contoh acara talk show di TV.
3. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi pada satu personal kepada satu personal lainnya contohnya *door to door visit*, temui publik atau komunikasi berperantara yaitu pasang sambungan langsung *hotline* buat publik.
4. Komunikasi organisasi yaitu gabungan komunikasi satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak, komunikasi tatap muka, contohnya diskusi tatap muka dengan bawahan/staf dan Komunikasi Berperantara contohnya pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksudkan pola komunikasi politik yang akan di analisis dalam tulisan ini adalah pola komunikasi vertikal dan horizontal dalam saluran komunikasi tatap muka dan komunikasi interpersonal.

Anwar (2003) dan Almond (1960) menilai bahwa proses-proses yang terjadi dalam komunikasi politik sering mengalami empat distorsi, yaitu sebagai berikut:

1. Distorsi bahasa sebagai topeng, ada *euphemism* (penghalusan kata), bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966), bahasa topeng.

2. Distorsi bahasa sebagai proyek lupa, lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan, lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.
3. Distorsi bahasa sebagai representasi, terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai ideologi. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang, monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian komunikasi politik yang bisa di simpulkan adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang aktor politik kepada komunikan politik yang menggunakan pesan-pesan yang berupa ideologi atau pandangan terhadap keputusan untuk mempengaruhi opini publik.

Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya

baik sebagai penyebab maupun akibat. Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*).

2.3. Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum (Pamungkas, 2011: 5). Miriam Budiarjo (2006: 160), mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Berfokus pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pemikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran antar golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuasaan dimana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan (Soemarno, 1999: 7-11).

Komunikasi dalam politik menjadi hal mutlak dalam merekrut partisipasi mobilisasi untuk memilih. Hal ini, patut dilakukan karena partisipasi pemilihan sangat menentukan eksistensi pemilihan keterwakilan dalam sebuah negara yang

berdemokrasi. Dirasakan perlu dalam peningkatan partisipasi dari pemilih pasif menjadi pemilih aktif serta dapat mengakomodir pemilih militan agar tidak terjadi pemilih yang apatis, maka model-model komunikasi menjadi bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap elit partai.

Perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut:

1. komunikasi politik, yaitu fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa

sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*).

2. Sosialisasi politik, yaitu sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
3. Rekrutmen politik, yaitu fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
4. Pengatur konflik politik, yaitu fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (Rahman, 2007: 103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

2.3.1. Partai Politik Lokal

Partai lokal sendiri sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (2006: 11) adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Lahirnya partai lokal juga merupakan amanat yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai politik lokal tujuan umum, yakni mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh Partai politik lokal berfungsi sebagai

sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat.

2.3.2. Partai Politik Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Poin 2 Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (redaksi, 2012: 46).

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Peraturan pemilu 2014: 9).

2.4. Dinamika Komunikasi

Dinamika komunikasi didefinisikan sebagai aktivitas ketika dua atau lebih orang menyampaikan pesan secara tatap muka dan sadar serta adanya kesamaan kepentingan yang dinyatakan sebagai tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dinamika (Santoso, 2004: 5) juga diartikan sebagai tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik.

Artinya ada interaksi dan ketergantungan antara satu kelompok dengan anggota kelompok lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dinamika lebih mengarah pada suatu aktivitas yang menunjukkan adanya pergerakan pada sebuah kelompok.

Istilah dinamika (Harmaini, 2016: 23) dapat juga menunjukkan pada kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota lain dalam sebuah situasi yang dialami. Sehingga, secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinamika komunikasi mengacu pada kekuatan interaksional dalam kelompok tertentu untuk dapat saling memahami persepsi para anggotanya, agar komunikasi yang dibangun dinamis atau teratur.

Berdasarkan uraian definisi mengenai dinamika komunikasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari dinamika komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan kepekaan diri seseorang dalam berinteraksi, sehingga dapat menimbulkan perasaan saling mengharga.
2. Timbulnya rasa solidaritas individu, sehingga saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain.
3. Terciptanya komunikasi terbuka terhadap sesama anggota sehingga menimbulkan sikap saling percaya dan adanya itikad yang baik dalam berkomunikasi.
4. Terbentuk kejasama saling menguntungkan.
5. Dibaginya beban kerja untuk mengurangi beban kerja yang terlalu besar sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih cepat selesai, sefektif dan efisien.

Ada beberapa tahapan untuk menciptakan komunikasi yang dinamis, yaitu *forming*, *storming*, *norming* dan *performing*. Adapun penjelasan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Forming* merupakan tahapan dimana anggota menempatkan diri berhubungan secara interpersonal, dan saling memperhatikan, bersahabat, dan mencoba melihat serta mempelajari bagaimana respon saat dirinya dan individu lain saling berinteraksi.

2. *Storming*, tahap ini merupakan tahap banyak kegiatan dan pembentukan norma, konflik mulai terjadi karena masalah kepemimpinan, tujuan, perilaku interpersonal. Namun konflik yang muncul pada tahap storming belum tentu menjadi pemicu komunikasi yang berlangsung hanya dalam *pola chaine* yakni mengandalkan pemimpin yang memberi keputusan akhir dalam kelompok.
3. *Norming* adalah tahapan belajar bekerjasama, mengembangkan informasi dan respon balik mulai dilontarkan secara aktif. Kerjasama dan rasa tanggung jawab mulai berkembang pada tahap ini. Hingga menjadi pemicu utama terciptanya kondisi yang dinamis.
4. *Performing*, merupakan pengaplikasian kerjasama yang efektif dalam menjalankan tugas. Dari tahap ini beberapa informasi yang disampaikan dapat terus berkembang, ada pula yang kemudian mengalami kemunduran, bahkan pemberontakan. Hal ini dapat terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor yakni, usia, sifat individu, lingkungan, budaya hingga *field of experience*.

2.5. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan dengan menghadirkan kajian penelitian terdahulu. Hal ini untuk menghindari asumsi penciplakan dari penelitian milik orang lain. Adapun kajian penelitian yang dihadirkan beraitan dengan kajian dinamika komunikasi partai politik. Adapun kajian penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Eko Harry Susanto M.Si dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, pada tahun 2019. Penelitian tersebut mengkaji mengenai kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang berpihak kepada rakyat. Penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Temuan penelitian mencakup, keberadaan para komunikator politik yang terdiri dari elite parpol dan calon anggota legislatif, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, dan kualitas anggota legislatif hasil pemilihan umum. Ketiga temuan tersebut merupakan faktor mendasar pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan anggota legislatif berkualitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dititikberatkan pada penelusuran data yang berkaitan dengan pemilu legislatif (Susanto, 2013: 163).
2. Penelitian berjudul dinamika partai politik, diteliti oleh A. Gau kadir dari jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut mengkaji tentang basis sosiologis partai politik, yaitu ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha memperoleh kekuasaan. Dalam

perkembangannya, partai politik telah berfungsi dan berperan dalam sistem politik demokrasi. Karena itu fokus bahasan dalam tulisan ini, ialah dinamika atau pasang-surut fungsi dan peranan partai politik dalam sistem politik demokrasi Indonesia dengan metode/pendekatan kualitatif-deskriptif. Bangsa Indonesia, telah akrab dengan partai-partai politik. Sebelum Republik Indonesia terbentuk, partai politik telah berfungsi dan berperan sebagai sarana perjuangan yang menggelorakan nasionalisme untuk kemerdekaan, demikian pula halnya setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia. Periode Demokrasi Parlementer, partai politik menampilkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen (DPR) merupakan kerangka pokok sistem politik Indonesia. Lain halnya, pada demokrasi terpimpin, terjadi penyederhanaan kepartaian. Kebijakan penyederhanaan kepartaian berlangsung pula dalam sistem demokrasi Pancasila era orde baru melalui undang-undang Nomor: 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menyatakan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusi partai-partai politik yang beraliran Islam, Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi partai-partai politik beraliran nasional/demokrasi, dan Golongan Karya. Di sini, Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang paling dominan yang menjadikan peranan partai politik

melemah. Tetapi, dalam sistem politik Demokrasi Pancasila era reformasi, fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik dalam sistem politik Indonesia (Kadir, 2014: 132).

3. Penelitian berjudul dinamika komunikasi dan budaya transparansi partai politik: Kasus PKS, yang merupakan penelitian O. Hasbiansyah, Ema Khotimah, Dadi Ahmadi dan Erik Setiawan dari Faulas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Dalam penelitian tersebut, Dinamika komunikasi di kalangan internal partai politik dan budaya transparansi partai politik dengan dengan kalangan eksternal merupakan hal yang sangat krusial dalam perpolitikan di Indonesia. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Partai yang menjadi fokus kajian adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi dinamika dan transparansi yang cukup intens di kalangan para pengurus dan kader partai. Transparansi partai dengan masyarakat konstituen telah diupayakan dibangun oleh para anggota legislatif melalui berbagai pertemuan. PKS sudah cukup intensif dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi implementasi UU KIP. Namun, PKS masih memiliki hambatan dalam implementasi UU KIP ini, yakni adanya

pandangan bahwa ada bagian UU KIP belum waktunya diberlakukan, serta beban kasus korupsi yang dihadapi PKS. (Hasbiansyah dkk, 2014: 551)

4. Penelitian dinamika komunikasi politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, oleh Widyananda Rhandika tahun 2017. Penelitian tersebut terkait Dinamika Komunikasi Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Menjelang Musyawarah Luas Biasa Partai Golkar 2016. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, observasi, dan *internet searching*. Adapun teknik analisis data yang dilakukan, melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik menjadi hal yang sangat sentral dalam membangun kesepahaman politik yang sama. Dimana dalam setiap peristiwa dan untuk terutama dalam setiap peristiwa politik terjadi komunikasi politik, oleh karenanya proses komunikasi politik, wacana dan pesan yang disampaikan haruslah mampu dipahami oleh individu-individu lainnya yang terikat dalam suatu bangunan politik. Sementara dalam realitas komunikasi politik cenderung bersifat pragmatis, hal ini dikarenakan setiap momentum peristiwa politik penting selalu ada campur tangan elit partai Golkar, terutama yang hari ini berada pada struktur kekuasaan. Sementara itu, apa yang dilakukan dewan pimpinan pusat partai dalam konteks komunikasi politik menjelang munaslub tersebut berjalan sesuai dengan apa yang

direncanakan, karena setiap individu, kader dan terutama pihak yang berkonflik sebelumnya telah melebur dan memainkan peranannya masing-masing dalam pertarungan berikutnya yang lebih substansial, yaitu munaslub tersebut. Setiap individu kader sudah melebur kedalam kepanitiaan, tim sukses calon ketua umum dan juga mengambil posisi aman dalam kontestasi tersebut. Kesimpulan penelitian yaitu bahwa dinamika komunikasi politik yang terjadi menjelang munaslub Golkar berada ditangan elit partai yang mengisi jabatan struktural di pemerintahan hari ini. Hal tersebut sangat menggambarkan, mengingat temuan-temuan lapangan yang mengarah kepada konteks tersebut. Saran yang dapat peneliti berikan, Partai Golkar harus mampu mempertontonkan sebuah peristiwa politik yang banyak mengedukasi masyarakat, hal ini mengingat posisi Partai Golkar yang begitu sentral dalam setiap peristiwa politik di negara ini (Widyananda, 2017).

5. Penelitian dinamika Islam politik pascaorde baru perspektif komunikasi politik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Asep Seful Muhtadi, tahun 2005. Ia memaparkan bahwa Wacana Islam politik di Indonesia hampir selalu menarik perhatian banyak kalangan. Alasannya sederhana. Selain Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan ajaran yang memberikan poin penting dalam masalah politik (siyasah). Karena itu, kaitan antara Islam dan politik senantiasa memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah

perpolitikan Indonesia. Perdebatan tentang dasar negara menjelang dan pasca kemerdekaan republik ini merupakan catatan yang sulit dilepaskan dari perjalanan sejarah Islam politik berikutnya. Ketika sejumlah pasal UUD 1945 diamandemen mengikuti era baru politik Indonesia, muncul pula ke permukaan isu sejarah lama yang menggaris bawahi cita-cita politik Islam yang pernah mengemuka hangat dalam majelis konstituante. Bahkan, partai-partai politik yang lahir setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, banyak di antaranya yang masih kuat mengikatkan salah satu akar kepengikutannya pada komunitas Islam. Tulisan ini selanjutnya difokuskan pada analisis atas variabel pergulatan Islam politik khususnya pasca runtuhnya kekuasaan orde baru. Sejarah perjalanan politik nasional yang dari waktu ke waktu hampir selalu melibatkan umat Islam telah mendorong tumbuhnya komunikasi politik intern dan antar kekuatan sosial politik yang ada. Sebab, seperti digambarkan Althoff (1997: 255), komunikasi politik sendiri merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi, serta proses rekrutmen secara praktis tergantung pada komunikasi (Muhtadi, 2005: 2017).

6. Penelitian berjudul dinamika komunikasi politik konferda DPD PDI perjuangan Jawa Barat (studi kasus mengenai komunikasi politik calon ketua termuda dalam konferda DPD Perjuangan Jawa Barat Peiode 205-2020). Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyu Khanoris, untuk mengetahui secara mendalam tentang dinamika komunikasi politik

Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dengan fokus Komunikasi Politik Calon Ketua Termuda Dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Periode 2015-2020. Untuk menjabarkan fokus penelitian, maka peneliti membagi ke dalam beberapa sub-sub masalah mikro yaitu, proses komunikasi politik dan realitas komunikasi politik. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif interaktif Studi Kasus. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang, yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka. Teknik uji keabsahan data dengan uji *credibility* dengan cara triangualisasi, dan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Proses komunikasi politik konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat adalah sebuah rentetan kejadian yang terjadi saat konfecab, penjaringan dan penyaringan serta terakhir tahap konferda. Pada semua tahap komunikasi politik yang dilakukan oleh calon ketua termuda menggunakan struktural Partai PDI Perjuangan dan personal ke DPC & PAC serta komunikasi ke DPP. Dengan menggunakan struktural dan personal calon ketua termuda lebih mudah untuk melakukan komunikasi politiknya. Realitas komunikasi politik yang terjadi saat Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yaitu menculnya nama Abdy Yuhana dalam 3 (tiga) besar calon ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Serta calon ketua termuda mendapat 69 suara rekomendasi dari DPC dan PAC. Kesimpulan Proses komunikasi politik konferda DPD PDI Perjuangan

Jawa Barat bahwa proses komunikasi politik terjadi pada saat konfercab, penjaringan dan penyaringan dan terakhir yaitu Konferda yang terjadi begitu dinamis, dimana calon ketua termuda melakukan komunikasi politik dengan memanfaatkan hierarki struktural partaidan personal. Realitas Komunikasi PolitikDPD PDI Perjuangan Jawa Barat munculnya nama calon ketua termuda sebagai ketiga calon ketua yang direkomendasikan oleh DPP. Setelah dilakukannya Musyawarah mufakat terpilihlah TB. Hassanudin sebagai Ketua, Abdy Yuhana sebagai Sekertaris dan Aang Hamid Suganda sebagai Wakil Ketua. (Khanoris, 2015)

7. Penelitian berjudul dinamika komunikasi politik di kaskus pada periode kampanye pemilihan presiden 5 Juni - 5 Juli 2014. (studi pada aktivitas kaskauser dalam pemilihan Presiden 2014). Muhammad Muhtadin Kholil dan Gancar Candra Premananto sebagai peneliti dalam kajian tersebut menyampaikan bahwa pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu syarat dalam sistem demokrasi. Pada pemilihan presiden (pilpres) ke tujuh tahun 2014, mulai banyak penggunaan media jejaring sosial seperti facebook, twitter, whatsapps, blackberry messengers, dan forum diskusi Kaskus sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menggalang dukungan massa. Dalam waktu yang relatif singkat, media sosial dapat mengumpulkan banyak pengikut. Penggunaan media sosial oleh para relawan dan pendukung tidak hanya sebagai alat mempromosikan para calon

presiden/wakil presiden, namun juga melakukan kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign) untuk menyerang dan menjatuhkan pasangan rival. Dinamika komunitas jejaring sosial memiliki karakteristik yang cair, kebebasan individu yang sangat besar, dapat digunakan oleh siapa saja dan kepentingan apa saja. Ekspresi di jejaring sosial Kaskus interaktif dan sangat beragam. Kaskus sarat akan dinamika (gerak) kekuatan yang dapat menimbulkan perubahan di tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika komunikasi politik pendukung Joko Widodo di Kaskus pada periode kampanye pemilihan presiden 5 Juni – 5 Juli 2014. Metode penelitian metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil yang didapatkan di media sosial hanya dapat menumbuhkan kepercayaan pemilih tetapi bukan sebagai penentu kemenangan (Kholil dkk, 2016: 136).

8. Penelitian berjudul otoritas ilmunan sosial politik, dalam dinamika politik oleh Muhammad Kausar Bailusy, tahun 2015. Penelitian tersebut mengajak pemaknaan dunia kemahasiswaan sebagai embrio ilmunan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu sosial dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu sosial dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui kepemilikan ilmu oleh

mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan sosial politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan sosial politik. Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam sistem politik yang penuh dengan dinamika politik. Hasil yang dapat disimpulkan dari gagasan ini yakni mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi yakni membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio ilmuan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuan yang rasional dan objektif (Bailusy, 2015: 191).

9. Penelitian mengenai dinamika politik internal partai Kebangkitan Bangsa dalam penentuan kandidat calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015 oleh Tigor Situmorang. Dipaparkan dalam penelitian tersebut, Pemilihan umum dijadikan partai politik untuk merekrut orang baru. Sebuah hal yang biasa bagi partai melakukan proses seleksi. Adanya rekrutmen politik ada harapan baru bagi demokrasi. Menghadapi Pilkada serentak 2015 DPC PKB Sidoarjo hanya membukapendaftaran bagi calon wakil Bupati. Menariknya untuk layak diteliti karena sebelumnya sudah ada nominasi

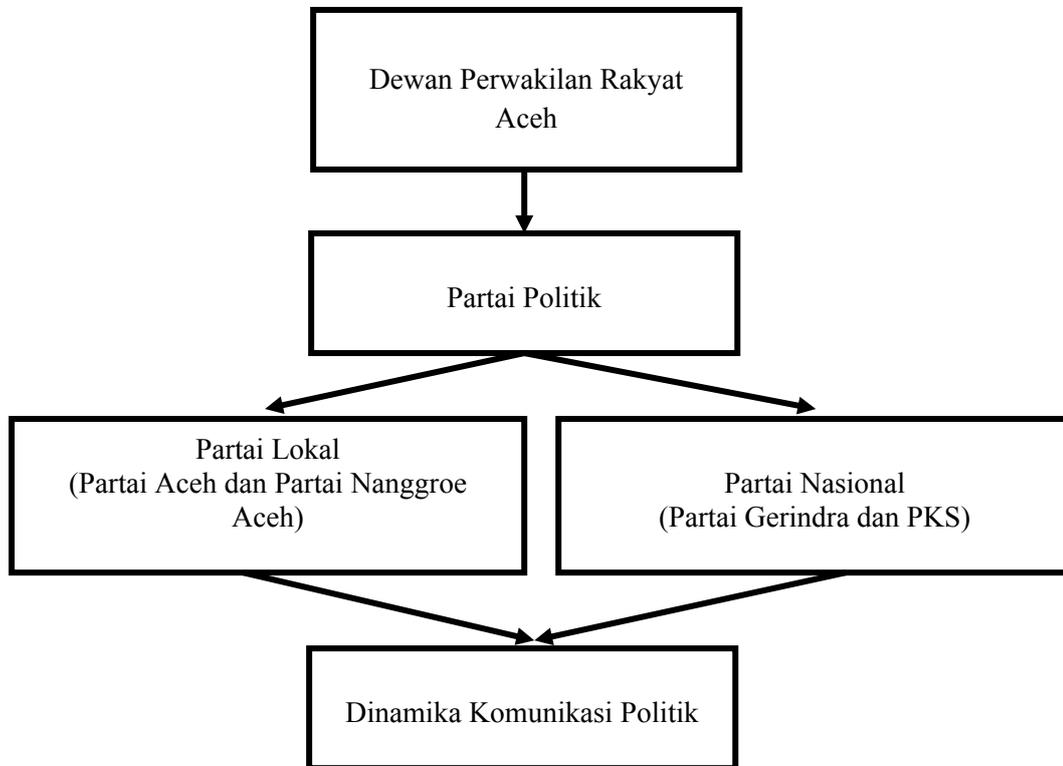
calon yang akan maju pada agenda Pilkada 2015. Kandidasi merupakan cara bagi partai untuk menentukan calon mana yang sesuai untuk menempati jabatan publik. Berkaitan dengan itu pula bagaimana proses seleksi yang ditentukan terkait dengan kandidasinya dan penentuan siapa calon wakil Bupati yang akan diusung PKB Sidoarjo dalam Pilkada 2015. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori yang dari Reuven Y Hazan & Gideon Rahat tentang seleksi kandidat dengan diperkuat oleh teori Pippa Norris tentang faktor yang dapat mempengaruhi. *Snowball sampling* adalah teknik menentukan informan dengan bantuan informan kunci. Dengan bantuan informan SM di dapat MR, yang kemudian didapat informan AN dan NAS atas saran dari informan MR. Dari hasil temuan tentang dinamika penentuan kandidat pada agenda pilkada serentak 2015 diSidoarjo ini ditemukan bahwa PKB mencoba terbuka melakukan penjaringan. Tetapi dari siapa yang akan memilih calon pendaftar akan bersifat eksklusif. karena ada *tim desk* pilkada yang ditentukan oleh internal DPC PKB dan DPW PKB Jawa Timur sebelum nantinya akan menunggu rekomendasi dari DPP. Penentuan calon bersifat desentralistik. Maka sudah dipastikan proses seleksi yang dilakukan DPC PKB dalam menjaring calon wakil Bupati termasuk tingkatan eksklusif (Situmorang, 2016: 342).

10. Penelitian dinamika partai politik dan positioning ideologi, studi tentang pergeseran positioning ideologi partai politik peserta pemilu 2014, oleh Yeby Ma'asan Mayrudin. Meneliti mengenai fenomena pergeseran posisi ideologis pada partai politik dalam Pemilu 2014. Ini juga menyajikan pemetaan posisi ideologis partai. Argumen utama yang diciptakan oleh partai-partai politik pada Pemilu 2014 sepertinya melakukan pergeseran posisi ideologis. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mengkarakterisasi pergeseran tipologi partai dalam pemilu 2014, setidaknya ada tiga pola yaitu konservatif, konservatif progresif, dan ekstremis (Mayrudin, 2017).

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana di atas, peneliti mendapati bahwa kajian-kajian terdahulu mengenai dinamika komunikasi politik diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Meskipun begitu, kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini, terdapat pada subjek dan objek penelitian. Adapun objek penelitian adalah partai lokal (PA dan PNA) dan partai nasional (Gerindr dan PKS), sementara itu subjek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

2.6. Kerangka Berpikir

Peneliti membuat kerangka berpikir ini dengan tujuan mempermudah analisis terkait dinamika komunikasi partai lokal dan partai nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun kerangka konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka berpikir penelitian berjudul dinamika komunikasi partai lokal dan partai nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Peneliti, Januari 2020)

Gambar 2.2 tersebut dapat menjelaskan bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdapat banyak partai politik mendapat jatah kursi, sebagai hasil pemilihan legislatif yang dilakukan. Dari seluruh partai politik yang ada, partai politik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, partai politik lokal dan kedua partai politik nasional. Dalam penelitian ini, partai politik lokal yang dijadikan subjek penelitian adalah partai lokal, yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Sementara itu, untuk partai nasional peneliti menetapkan pada partai Gerindra dan PKS.

Selaku legislator, orang-orang yang duduk membawa dua bendera parpol yang berbeda, memiliki kepentingan terarah, khususnya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk menjalankan misinya tersebut, masing-masing parpol melakukan komunikasi politik. Selanjutnya, komunikasi politik yang dilakukan akan menciptakan sebuah pergerakan-pergerakan dari partai politik tersebut. Pergerakan inilah yang disebut sebagai dinamika komunikasi politik.

2.7. Kategorisasi Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti dapat membuat konsep operasional penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian

Dinamika Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikator 2. Komunikan 3. Pesan 4. Media komunikasi 5. Efek komunikasi 6. Kepekaan. 7. Solidaritas. 8. Keterbukaan. 9. Kerjasama. 10. Adanya pembagian kerja.
---------------------	---

-
- Partai Politik Nasional
1. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
 2. Berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945
 3. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia.

-
- Partai Politik Lokal
1. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia di Aceh.
 2. Berdasarkan pancasila dan UUD tahun 1945, namun dapat mencantumkan identitas masyarakat Aceh.
 3. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
 4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh.

(Sumber: Peneliti, Januari 2020)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini menguraikan bahasan mengenai paradigma dan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Adapun paradigma dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1. Paradigma Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dapat berbeda sesuai dengan cara pandang yang diyakini. Cara pandang inilah yang kemudian disebut sebagai paradigma. Menurut Moleong, paradigma (2004: 49) merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.

Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*). Paradigma ini (Arikunto, 2006: 12) merupakan cara pandang dengan melihat fakta terjadi secara alamiah, dalam situasi normal dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Paradigma ini bersumber pada pandangan fenomenologis yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi konsep berpikir maupun bertindak para manusia yang menjadi subjek peneliti. Sebab, Moleong (2004: 50) mengatakan bahwa apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian (Moleong, 2010: 6) tersebut merupakan sebuah metode dalam meneliti dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah atau dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian kualitatif (Sugiono, 2012: 9) dijelaskan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*. Ini digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah. Dengan memakai metode ini, peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif (Silalahi, 2009: 77), digambarkan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan menganalisa fenomena dan mencoba memahaminya melalui metode ilmiah guna mendapatkan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai

fenomena yang diteliti, data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data kata maupun gambar.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi terhadap variabel dari fenomena yang diteliti. Fenomena tersebut yang akan menjadi konsep atau variabel, yakni subjek dan objek dalam penelitian.

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Sedangkan objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti (Supranto, 2000: 21). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah partai lokal (PA dan PNA) dan partai nasional (Gerindra dan PKS).

3.4. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97). Informan dalam penelitian ini adalah H. Abdurrahman Ahmad selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra, Zaenal Abidin S.Si selaku Ketua Fraksi Partai PKS, Samsul Bahri (Tgk Tiyong) selaku Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Tarmizi (Tgk. Panyang) Ketua Fraksi Partai Aceh (PA). Pemilihan empat informan dalam penelitian ini berdasarkan kesediaan mereka untuk

mengungkapkan pengalaman sebagai pelaku politik partai lokal dan partai nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lebih dari satu periode, serta sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian berupa dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (narasumber) (Arikunto, 2006: 155). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data yang melibatkan antara komunikator (peneliti) dengan komunikator (informan) dalam mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya kebenarannya.

Penelitian juga menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan wawancara yang telah dibuat sebelum kegiatan wawancara dilakukan. Pedoman wawancara tersebut membantu peneliti dalam menggali dan mengurutkan secara jelas data dari informan penelitian. Dalam wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam suara serta alat tulis untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan dalam penelitian.

2. Observasi

Teknik observasi sendiri diartikan sebagai cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung (Sukmadinata, 2011: 220). Sementara itu, menjelaskan bahwa dalam observasi setidaknya-tidaknya ada tiga macam metode yaitu observasi biasa, observasi terkendali dan observasi terlibat.

Observasi biasa merupakan metode yang tidak perlu terlibat dalam hubungan emosi dengan pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Penelitian ini juga tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pelaku seni yang diamatinya melainkan hanya mengumpulkan informasi apa yang dilihat secara langsung oleh mata maupun dibantu dengan alat dokumentasi.

Observasi terkendali memiliki definisi yang hampir sama dengan observasi biasa. Hanya saja pelaku yang diamati dapat dipilih dan kondisi-kondisi yang ada dalam ruang atau tempat kegiatan dikendalikan oleh peneliti.

Observasi terlibat merupakan bentuk observasi yang menuntut keterlibatan langsung pada dunia sosial yang dipilih untuk diteliti. Keterlibatan peneliti dalam penelitian memberikan peluang yang sangat baik untuk melihat, mendengar dan mengalami realitas sebagaimana yang dilakukan dan dirasakan oleh para pelaku, masyarakat serta kebudayaan setempat (Rohidi, 2011: 184-189). ketiga Metode observasi tersebut, peneliti memilih metode observasi terlibat sebab peneliti terlibat langsung dengan informan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mencatat

hal-hal yang penting atau berkaitan dengan penelitian. Yakni, dinamika komunikasi partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan permasalahan dinamika komunikasi antara dua kelompok partai tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Artinya, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendekati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai lokal maupun dari partai nasional. Selama observasi, peneliti menggunakan alat bantu buku catatan, perekam suara dan foto sebagai alat untuk dokumentasi selama pengumpulan data penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2003: 335).

Dapat diartikan bahwa teknik analisis data merupakan cara peneliti dalam mengolah data hasil penelitian dan merangkumnya dalam bentuk kata maupun gambar yang dapat memberikan sebuah kesimpulan serta mudah dipahami.

Miles dan Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari :

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data *kasar* yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004: 330). Denzin dalam Moloeng (Moleong, 2004: 338), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

3.7. Keabsahan Data

Guna mempertanggungjawabkan hasil penelitian maka diperlukan adanya uji keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007: 270).

Uji *credibility* merupakan uji kepercayaan terhadap penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. *Transferability* merupakan validitas eksternal penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. *Dependability* disebut juga sebagai reabilitas yakni penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan prosedur yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian ini dilakukan dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Confinbility merupakan pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320).

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jl. Tgk Daud Beureueh , Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

3.8.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak bulan April 2019 hingga bulan Januari tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan di Bab IV ini. Hasil penelitian didapat dari jawaban dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan lembaga legislatif ditingkat provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah Aceh. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai wadah dalam melangsungkan musyawarah dan mufakat. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdiri sejak tahun 1945 dengan nama Komite Nasional Daerah (KND). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 serta diperkuat dengan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. Untuk pertama kalinya, Tuanku Mahmud menjabat sebagai ketua KND. Setelah periode Tuanku Mahmud berakhir, ketua KND dijabat oleh Mr. S. M. Amin.

Hingga dua tahun kemudian (1947), nama KND dirubah menjadi DPR. Namun, tahun 1950 DPRD dibubarkan. Hal ini berkaitan dengan Keresidenan Aceh dijadikan Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh berdiri sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949-1950 dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab.

Provinsi Aceh kemudian lahir kembali sesuai dengan UU No. 24 tahun 1956. Maka dibentuklah DPRD Peralihan pada 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam yang memimpin hingga 1959. Pada dan tahun 1959-1961 diketuai Tgk. M. Ali Balwy.

Sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 1960, DPRD berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) tahun 1961-1964 diketuai Gubernur Aceh A. Hasjmy. Selanjutnya, UU No. 181 Tahun 1965 DPRDGR Tahun 1965-1966 Gubernur Nyak Adam Kamil, PD menjabat ketua DPRDGR. Periode 1966-1968, Ketua DPRD diisi oleh Drs. Marzuki Nyak Man. Dan Periode 1968-1971, Ketua DPRD dijabat oleh H. M. Yasin.

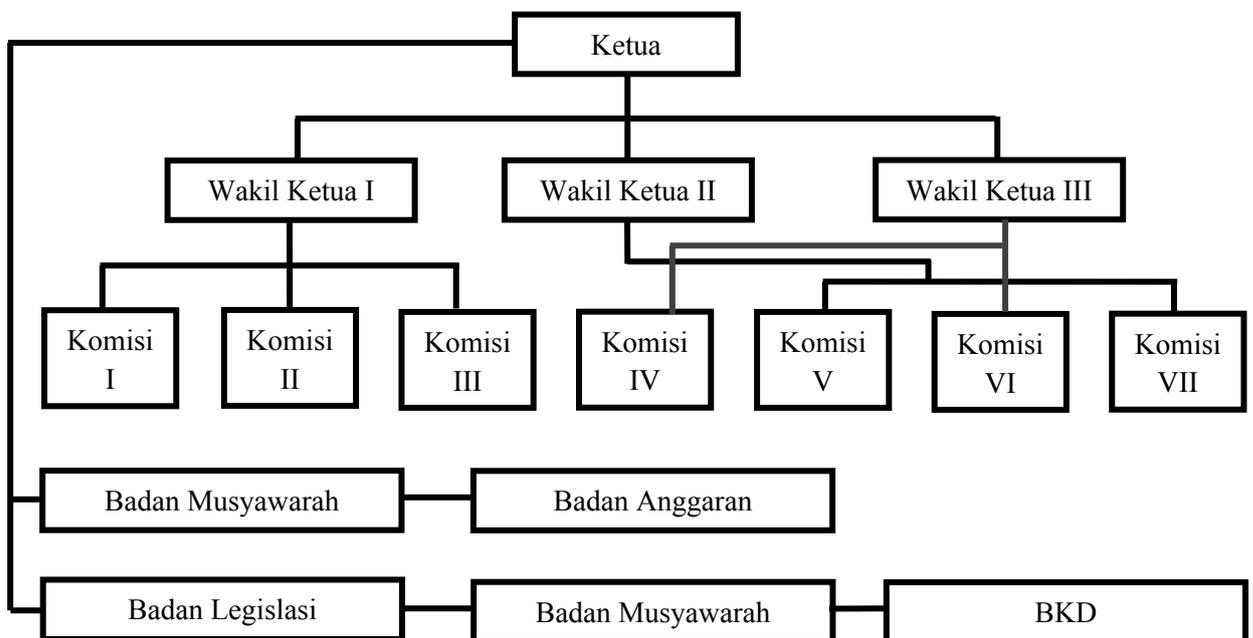
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi), maka sejak tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan. Selanjutnya DPRD di Aceh, ditetapkan sesuai hasil Pemilu.

4.1.2. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Visi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah tercapainya citra Lembaga yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan secara optimal Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, misi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai mekanisme yang ada.
2. Mensinergikan pemahaman dari alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
3. Meningkatkan keterbukaan/transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
4. Meningkatkan keikutsertaan semua komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan cara menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang sebagai bahan masukan.
5. Meningkatkan komunikasi dengan semua komponen masyarakat.

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dibagi ke dalam beberapa komisi yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.1. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Januari 2020).

Melalui gambar 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa struktur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdiri dari Ketua, Wakil ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislatif, Badan Kehormatan dan BKD. Melihat garis koordinasi, dapat dipahami bahwa ketua memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi langsung kepada seluruh wakil ketua, komisi dan badan. Sementara itu, Wakil Ketua I membawahi 3 komisi, yakni Komisi I, Komisi II dan Komisi III. Wakil ketua II membawahi dua komisi, yaitu Komisi V dan Komisi VII. Sedangkan Wakil Ketua III membawahi Komisi IV dan III.

Setiap komisi sendiri memiliki bidang-bidang tertentu yang menjadi konsentrasi kerja mereka. Adapun bidang-bidang yang ditangani tersebut sebagai berikut:

Komisi I berkonsentrasi pada bidang hukum, politik dan pemerintahan. Secara rinci, bidang tersebut meliputi pemerintahan umum, sekretariat daerah, pertahanan, keamanan dan ketertiban, politik, hukum, HAM dan Perundang-Undangan, pertanahan, pemetaan, statistik, kepegawaian, aparatur, organisasi kemasyarakatan, keimigrasian dan urusan luar negeri.

Komisi II meliputi bidang perekonomian, SDA, dan lingkungan hidup. Adapun bidang tersebut meliputi perindustrian dan perdagangan, standar mutu dan perlindungan konsumen, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan,

perkebunan, kehutanan, ketahanan dan kedaulatan pangan, logistik, koperasi dan UKM, lingkungan hidup, dan pertambangan energi.

Komisi III membidangi masalah keuangan dan investasi yang meliputi keuangan daerah, aset daerah dan inventaris daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan Aceh, perusahaan patungan dan bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, penanaman modal dan investasi, perencanaan dan pengawasan keuangan daerah, dunia usaha, dan perizinan.

Komisi IV membidangi masalah pembangunan dan tata ruang yang meliputi, pekerjaan umum, penataan dan tata ruang, pengawasan kota, perhubungan, informasi dan komunikasi, pemukiman dan perumahan rakyat.

Komisi V membidangi masalah pendidikan, sains dan teknologi yang meliputi pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kearsipan perustakaan, riset, teknologi, astronomi, dan geofisika.

Komisi VI membidangi masalah kesehatan dan kesejahteraan yang meliputi kesehatan, keluarga berencana, peranan perempuan, kesejahteraan rakyat, perlindungan anak dan perempuan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.

Komisi VII membidangi masalah agama dan kebudayaan, meliputi agama, pelaksanaan syariat Islam, sekretariat Wali Nanggroe, pendidikan dan pembinaan Dayah, peradilan agama Islam, urusan haji dan umrah, ke-Ulamaan, zakat, infaq, sedekah dan waqaf, izin pendirian tempat ibadah, kebudayaan, adat istiadat, dan pariwisata.

4.1.3. Dinamika Komunikasi Antara Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada empat orang informan, yakni Informan dalam penelitian ini adalah Drs. H. Abdurrahman Ahmad selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra, Zaenal Abidin S.Si selaku Ketua Fraksi Partai PKS, Samsul Bahri (Tgk Tiyong) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sekaligus Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Tarmizi (Tgk. Panyang) Ketua Fraksi Partai Aceh (PA).

1. Wawancara Ketua Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Abdurrahman Ahmad

Drs. H. Abdurrahman Ahmad merupakan pria kelahiran Aceh Besar, 12 Juni 1963. Ia merupakan politisi dari partai Gerindra. Kerja keras, loyalitas dan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan I (Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang) membuat karir politiknya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh langgeng hingga 3 periode, tepatnya sejak tahun 2004 silam. Hal itu didukung pula dengan kemampuan alumni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai seorang pengusaha. Sehingga, sejak awal pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Abdurrahman terus menggiring ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh, disamping memperjuangkan aspirasi lainnya. Dengan tiga perodesasi yang dijalannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

membuat Abdurrahman memiliki pengalaman cukup dalam berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sebagai politisi dari partai Gerindra, Abdurrahman juga memahami posisinya berada di kelompok partai nasional dan tidak menutup diri untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lain yang berasal dari partai lokal.

“Sering. Karena kalau ada hal yang didiskusikan, tentu harus kita bahas bersama. Dan kita juga bagian dari Anggota Dewan. Komunikasi mutlak harus kita lakukan. Kalau tidak, tidak mungkin kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dewan. Apalagi, di DPR ada komisi, komisi itu tergabung dalam berbagai macam partai politik.”

Peneliti juga tertarik untuk menanyakan, dengan cara seperti apa komunikasi biasanya dilakukan oleh Abdurrahman dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai lokal. Abdurrahman pun memberikan jawaban sebagai berikut.

“Tatap muka lebih sering. Kalau dalam rapat-rapat kita lebih tatap muka. Kalau beda pendapat sering terjadi tapi tidak sampai terjadi silang pendapat yang tajam.”

Selain ke sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, komunikasi juga dilakukan ke pemerintah Aceh. Komunikasi yang dibangun terkait dengan rancangan serta aplikasi program pembangunan yang sudah dicanangkan. Seperti yang diutarakan oleh Abdurrahman sebagai berikut:

“Secara fraksi baik. Tidak ada masalah. Sering kita duduk-duduk dengan pemerintah dalam hal pembangunan. Meskipun mungkin yang kita diskusikan tidak semuanya jalan. Tapi walaupun tidak dikasih, ya gak masalah. Apakah soal yang kita diskusikan jalan diaplikasi oleh eksekutif, ya tidak semuanya.”

Komunikasi tidak tertutup hanya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saja, melainkan kepada masyarakat. Komunikasi ini menjadi kewajiban dari wakil rakyat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman sebagai berikut.

“Ada, selalu berkomunikasi dengan konsistuen kita mendengarkan keluhan mereka. Kita beri jalan keluar. Kalau belum bisa diberi solusi, saya tampung dulu.”

Biasanya, Abdurrahman melakukan komunikasi dengan berbagai macam cara.

“Melalui telepon, duduk-duduk. Kadang ada silaturahmi sambil minum kopi. Tapi yang paling khusus, kita lakukan dengan reses. Sambil kita mengunjungi daerah pemilihan kita, juga diskusi dengan konsistuen daerah pemilihan kita. Dalam pertemuan itu, konsistuen kita sering mengemukakan pendapat dan itu kita catat.”

Komunikasi yang dibangun kepada konsistuen berkaitan dengan kebutuhan atau masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagai kebutuhan dan butuh solusi untuk diselesaikan.

“Lebih kepada kebutuhan konsistuen. Setelah kita terpilih kan banyak harapan dari kita yang mereka harapkan. Terutama menyangkut persoalan-persoalan kehidupan mereka. Banyak yang sifatnya usaha, mereka minta dibantu modal kerja, masyarakat yang belum kerja minta dibuka lapangan kerja, petani minta kebutuhan petani. Jadi lebih banyak minta kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kalau di sini mereka juga minta program, mita keiatan, mungkin minta dimasukkan kerja. Itu tidak semuanya kita selesaikan, tapi tetap kita tampung.”

Temuan masalah di masyarakat dan pemerintahan nantinya akan digodok. Hal-hal penting lain akan menjadi wacana untuk menjadi sebuah kebijakan. Sebagai anggota dari partai nasional, wacana kebijakan membutuhkan pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lain, termasuk dari partai lokal.

“Tentang kebijakan itu, pertama kita lihat sifat kebijakan itu. Apakah kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat kalau keinginan

masyarakat kita berusaha menolak, itu kita mengajak partai lokal, partai nasional. Yang sifatnya kebutuhan kita juga diskusikan dengan partai lokal agar bersama-sama dirumuskan dalam kebijakan daerah. Kalau sendiri tidak akan berhasil.”

2. **Wawancara Ketua Fraksi PKS, Zaenal Abidin S.Si**

Zaenal Abidin S.Si merupakan Ketua Fraksi PKS. Alumni dari Universitas Unsyiah tahun 2001 silam ini, sudah cukup lama menjadi perwakilan rakyat di gedung dewan. Dua periode di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) dan dua periode mengisi kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bagi Zaenal Abidin, komunikasi dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari kelompok partai nasional harus melakukan komunikasi dan interaksi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lainnya, termasuk dari partai lokal.

“Ya, ini sebuah kegiatan rutin kita interaksi dan berkomunikasi. Yang dibicarakan berkenaan dengan apa namanya, yaitu kepentingan masyarakat. Insya Allah ini akan terus dilanjutkan memang. Karena itu penting. Baik partai lokal maupun nasional. Bersinergi malah.”

Komunikasi yang terjalin harus baik, mengingat antara partai nasional dan partai lokal saling membutuhkan dan harus saling bersinergi. Seperti yang dikatakan oleh Zaenal Abidin sebagai berikut.

“Hubungan komunikasi kita baik-baik saja. Berjalan dengan lancar, itu tadi, karena memang kita sangat membutuhkan keberadaan kawan-kawan baik itu dari partai lokal maupun nasional. Kalau kawan-kawan dari partai nasional, ya ini kan sering kita dapatkan isu-isu yang bersifat nasional. Terlebih lagi kita memiliki *channel* di Jakarta. Kalau dengan partai lokal, mereka memerlukan kita karena mereka tidak memiliki cantolan di tingkat nasional. Makanya terhadap hal-hal yang kita sepakati, inilah komunikasi terus berjalan.”

Komunikasi yang terjalin diantara sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, diterangkan Zaenal menyangkut perihal aturan atau kebijakan khusus pemerintahan Aceh.

“Inikan menyangkut Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 kalau tidak salah, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena itu menyangkut dengan kekhususan Aceh, dan inikan menjadi kepentingan kita bersama. Makanya, kita dengan partai lokal, kita mendorong pemerintah pusat bisa menepati keiinginan yang suda tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut. Partai lokal tadi butuh kita karena kita punya koneksi ya, punya ayah di Jakarta. Makanya ini sama-sama kita dorong agar Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini bisa berjalan, bisa terlaksana di Aceh.”

Berbeda jika sedang berkomunikasi dengan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai nasional. Menurut Zaenal, pembahasan lebih menjurus kepada persoalan-persoalan yang bersifat nasional.

“Yang kita bahas dari anggota dewan partai nasional ya, menyangkut hal yang menjadi tupoksi pemeintah pusat. Menyangkut infrastruktur, ekonomi dan juga menyangkut hal-hal yang berkenaan dengn kesehatan. Kita duduk dan mencoba mencari solusi. Kalau di tataran kita, di partai nasional yang di tingkat provinsi tidak selesai, kita mencoba meminta solusi dari partai tingkat pusat.”

Zaenal menjelaskan bahwa komunikasi yang ia lakukan baik kepada sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai nasional maupun dari partai lokal, lebih menyukai komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka.

“Kita tatap mukalah, baik secara formal maupun informal.”

Komunikasi terhadap pemerintah juga dinyatakan Zaenal dilakukan melalui sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Di luar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, komunikasi tetap terjalin melalui pertemuan informal.

“Kita jalani saat sidang-sidang di dewan. Baik menyangkut penyusunan APBA, kemudian juga pengawasan APBA dan juga program-program legislasi harus kita jalankan. Jadi inilah bentuk komunikasi yang menjadi tupoksi kita. Di luar itu ya kita ada komunikasi di forum-forum informal.”

Zaenal Abidin juga melakukan komunikasi ke tingkat konsistuen. Hal ini sebagai upaya menampung persoalan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya.

“Kita yang secara formal melalui reses. Setahun 3 kali. Itu sarana yang kita jadikan komunikasi dengan konsituen. Yang kedua, saat kita kunjungan kerja ke daerah pemilihan, kita melakukan komunikasi dengan konsituen. Dan tidak tertutup kemungkinan konsistuen kita ini pergi ke Banda Aceh menjumpai kita. Ini semua kita bangun dengan konsituen. Jangan sampai kita melupakan jasa mereka. Kita coba melayani sesuai kemampuan kita.”

Terkait tindak lanjut problema yang ada di tengah-tengah masyarakat, Zaenal memberikan analogi sebuah persoalan kebijakan untuk pembuatan rumah sakit regional di Aceh.

“Yang sudah kita kerjakan, yang pertama, kita kan dewan periode lalu memutuskan lima kabupaten membuat rumah sakit regional. Kenapa lahir rumah sakit regioal. Karena, begitu banyaknya antrean di RS Zainal Abidin terhadap masyarakat yang berobat rujukan dari daerah. Sedangkan di RS Zainal Abidin kan kamar terbatas, ruang operasi, tenaga medis kan terbatas. Kita mencoba memotong antrean itu membangun rumah sakit regional. Khusus untuk Barat Selatan, Alhamdulillah kita mendapat dua kabupaten. Satu Aceh Barat, satu lagi Aceh Selatan. Harapannya, memang bangunan ini selesai dalam waktu 5 tahun. Sehingga kita dapat memangkas daftar antrean yang begitu panjang di RS Zainal Abidin. Ternyata pada saat pembangunan, pemerintah menganggarkan sangat sedikit. Padahal waktu itu, kita mencoba pemerintah punya komitmen setiap tahun menganggarkan 1 rumah sakit Rp.100 milyar. Tapi ternyata pemerintah menganggarkan di bawah itu. Itu salah satu contoh. Begitupun dengan masalah PJS. Banyak masyarakat yang belum tertampung di BPJS. Nah, ini kita tindaklanjuti sehingga masyarakat mendapat BPJS.”

Segala kebijakan yang dibuat, diakui oleh Zarnal harus melibatkan semua pendapat dan persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai nasional maupun partai lokal.

“Merumuskan kebijakan inikan kita harus banyak referensi, dan juga harus banyak masukan. Dan referensi atau banyak masukan tidak tertutup dari partai nasional maupun hanya dari partai lokal saja. Karena kebijakan yang akan kita buat adalah kebijakan yang akan kita pakai bersama.”

Zaenal juga menyatakan bahwa fungsi mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah melakukan pengawasan. Latar belakang partai yang berbeda tidak membatasi mereka melakukan pengawasan secara bersama-sama. Ada beberapa cara pengawasan yang mereka lakukan, yaitu.

“Pertama adalah pengawasan berdasarkan audit BPK, karena BPK adalah lembaga negara yang tugasnya itu. Yaitu membuat audit keuangan pemerintahan. Kedua berdasarkan laporan masyarakat, kita tindaklanjuti. Ketiga, pengawasan berdasarkan kesepakatan bersama di lembaga ini.”

3. Wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi PNA, Tgk Samsul Bahri (Tgk Tiyong)

Pria kelahiran Samalanga, Bireun pada 20 Januari 1972 ini memiliki nama lengkap Tgk. Samsul Bahri Ben Amiren. Ia akrab disapa dengan Tgk Tiyong. Karirnya di organisasi bermula menjadi pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Ia sempat dipercaya sebagai Panglima Daerah I GAM Wilayah Batee Iliiek. Di kancah politik, Tahun 2007 Tgk Tiyong dipercaya mengisi struktur Sekretaris DPW Partai Aceh Bireun. Di tahun 2017, Tgk Tiyong menjabat sebagai Ketua Harian di Partai Nanggroe Aceh (PNA). Dan tahun 2019, dalam sebuah Kongres Luar Biasa (KLB), Tgk Tiyong secara aklamasi menduduki posisi Ketua Umum

PNA menggantikan Irwandi Yusuf. Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sendiri, Tgk Tiyong tercatat sudah menjadi anggota legislatif selama tiga periode. Keberadaan Tgk Tiyong di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membuatnya familiar dengan situasi dan kondisi di dalam maupun luar lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, termasuk dalam menempatkan diri untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para anggota legislatif lain, baik dari partai lokal maupun dari partai nasional.

“Sering, karena kita di Anggota DPR walaupun berbeda partai, yang pada intinya sama-sama tujuan, yaitu tujuan legislasi kepentingan Aceh, bersama pemerintah Aceh juga ada fungsi kita sebagai fungsi penganggaran untuk kepentingan masyarakat Aceh juga bersama tim penganggaran pemerintah Aceh. Juga ada fungsi pengawasan melekat pada anggota DPR, jadi kita harus saling komunikasi antara satu dengan yang lain, walau berbeda partai ketika kita maju di sana kita sama semua. Sering kita komunikasi baik formal maupun tidak formal. Karena bicara kepentingan daerah kita harus komunikasi.”

Baginya keberadaan partai politik yang terbagi dalam dua golongan, yakni golongan partai lokal dan golongan partai nasional, bukanlah menjadi hal yang harus dipersoalkan.

“Baik, karena kita semua tidak bertanding tapi kita bersanding untuk kepentingan rakyat Aceh, baik partai lokal maupun partai nasional, anggota DPR yang terpilih sekarang adalah semua kepentingan rakyat. Ketika berbicara kepentingan rakyat, kita harus bersinergi, harus bergandeng tangan untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat yang terjadi hari ini dan ke depan juga. Berkat kerjasama kita baik partai lokal maupun partai nasional bisa apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terakomodir.”

Tgk Tiyong pun memperjelas kembali, bahwa komunikasi yang dilakukannya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah untuk kepentingan masyarakat Aceh.

“Ada tatap muka, ada telepon. Dimanapun, kapanpun kalau bertemu kita membahas kepentingan masyarakat Aceh. Kita berbicara apa tanggungjawab kita untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.”

Artinya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya di daerah pemilihannya, Tgk Tiyong juga melakukan komunikasi kepada konsistuenya. Hal ini ditegaskannya dalam pernyataan sebagai berikut.

“Tentu saja, karena konsituen adalah orang-orang yang telah mempercayai saya untuk dapat duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini. Mereka yang harus kita pikirkan. Karena keberadaan kami di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini untuk mereka, sebagai wakil rakyat.”

Ada beberapa cara komunikasi yang dilakukan oleh Tgk Tiyog.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk Tiyong sebagai berikut.

“Ada komunikasi ketika pulang ke kampung, ada reses, ada pansus, kita juga kumpul konsistuen, dan kita di sini karena konsituen. Kita juga harus komunikasi intens kepada mereka, karena mereka juga bagian daripada orang-orang yang mencari di lapangan, apa kebutuhan masyarakat. Makanya kita harus intens komunikasi agar kita dapat berjalan dengan baik sebagai anggota DPR.”

Tgk Tiyong tidak hanya sebagai pendengar untuk setiap persoalan yang menjadi keluhan kesah masyarakat yang dijumpainya, melainkan menampunya sebagai aspirasi dan berusaha memberikan jalan keluar.

“Tugas kita ketika dilantik dan disumpah, adalah wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tuga kita di DPR ini kan non teknis, kita perjuangkan, selebihnya kita serahkan kepada pemerintah yang eksekutornya, yang teknisnya. Ketika hal-hal yang penting yang memang bermanfaat kepada orang-orang banyak tidak diakomodir, kita akan memanggil SKPA-SKPA melalui Gubernur untuk duduk bersama kenapa ini tidak diakomodir, misalnya kekurangan anggaran tahun ini. Bagaimana tahun selanjutnya. Yang penting kita harus memperjuangkan. Kita bukan dinas pelaksana, dinas teknis, jadi pelaksanaan teknisnya bukan wewenang kita.”

Perbedaan kelompok partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga membawa pengaruh bagi perbedaan atau ketidaksepemahaman antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal ini diterangkannya sebagai berikut:

“Ya, tentu saja. Karena adanya perbedaan antara partai politik lokal sama partai politik nasional ini, tentu saja membawa perbedaan pandangan dari masing-masing partai.”

Sebagai bagian dari partai lokal yang memiliki jumlah suara partai terbesar kedua Tgk Tiyong selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai lokal maupun nasional dalam membuat sebuah keputusan. Tgk Tiyong paham, jika tidak dalam semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyetujui setiap kebijakan yang dibuat. Meskipun demikian, Tgk Tiyong tetap memegang prinsip menghargai pendapat.

“Prinsip saya, perbedaan pandangan itu adalah kebersamaan. Kita menghormati kebersamaan, kita juga menghormati perbedaan pandangan untuk mencapai kesempurnaan. Ini dalam politik kadang-kadang tidak bicara aturan. Kalau bicara aturan, tidak ada bicara negosiasi. Kadang-kadang kebijakan politik hari ini tidak sesuai dengan naluri saya, kehenda saya. Tapi ketika ini kepentingan mayoritas kita, kita juga harus ikuti, harus *legowo*, harus berbesar hati. Berarti inilah keputusan kita, karena sistem parlemen, dia sistem demokrasi, ada keputusan mayoritas dan masalah minoritas. Apa yang diputuskan mayoritas, itulah keputusan bersama.

Kebersamaan antra partai lokal dan partai nasional diterapkan Tgk Tiyong tidak hanya pada saat perumusan kebijakan atau musyawarah lainnya, melainkan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah mereka sepakati bersama.

“Itu harus bersama. Karena semua anggota DPR memiliki hak yang sama untuk melakukan pengawasan. Fungsi kita adalah fungsi pengawasan DPR. Setiap rupiah yang telah kita sahkan bersama pemerintah Aceh harus dipastikan berjalan sesuai aturannya. Itu yang perlu kita kawal. Yang kedua pengawasan kita adalah, hari ini dalam sistem pembahasan ada kepentingan orang lebih banyak diantara orang banyak. Misalnya, ada satu irigasi yang dibutuhkan adalah 20.000 Ha lahan kita perioritaskan dahulu ketimbang kebutuhan 200-300 Ha. Ketika pemerintah tidak mengakomodir hal itu, itu tugas kita sebagai pengawas untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah, terus berkomunikasi dengan elemen-elemen lain agar program-program prioritas itu harus diprioritaskan pemerintah.”

4. Wawancara Ketua Fraksi Partai Aceh, Tgk Tarmizi (Tgk Panyang)

Tgk Tarmizi atau yang lebih Tgk Panyang merupakan pria kelahiran 1 September 1978 di Babah Krueng Kecamatan Sawang Aceh Utara. Di usianya yang ke-22, Tgk Payang mulai merantau ke Banda Aceh. Ia mengadu nasib dengan menjadi buruh kasar, hingga pelayan dari warung kopi. Beberapa tahun kemudian (tahun 1996) saat konflik terjadi di Aceh konflik di Aceh, Tgk Panyang memutuskan untuk berjuang melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan, Tgk Panyang juga sempat diberi amanah sebagai Panglima GAM Sago Tgk Di Lhok Drien Wilayah Pasee (Aceh Utara). Di kelompok tersebut, ia mulai belajar untuk belajar banyak hal, salah satunya tentang politik melalui diskusi dengan banyak orang yang memiliki bermacam karakter. Cita-citanya untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Aceh menghantarkannya untuk masuk ke partai politik, dan sejak pemilu 2014 silam, Tgk Panyang dipercaya mewakili Aceh Utara dan Lhoksumawe. Di tahun 2020 ini merupakan periode kedua baginya untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan pengalamannya tersebut, Tgk Panyang memaparkan seperti

apa komunikasi yang dilakukannya selama dengan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai lokal maupun partai nasional.

“Pada awalnya setelah perdamaian Aceh secara umum dan setelah lahirnya parti lokal di Aceh, kita berharap secara umum pimpinan-pimpinan partai komunikasi ini untuk lebih baik dan lebih mengarah membicarakan rakyat Aceh. Kedua, pimpinan-pimpinan partai nasional dan partai lokal ini pastinya ketika berbicara Aceh ini berbicara Aceh partai untuk kepentingan Aceh, tidak ada hanya untuk kepentingan partai lokal atau PA secara umum. Jadi bagaimana komunikasi anda dengan partai nasional, saya sendiri setelah masuk politik dari tahun pertama, periode pertama dan periode kedua. Sebenarnya tidak ada beda bagi saya untuk memikirkan dan untuk membicarakan kepentingan-kepentingan Aceh di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan lembaga pemerintahan Aceh. Ini pada dasarnya begini, karena di partai nasional pun a.. yang di lokal atau yang di Aceh sini adalah orang Aceh juga yang menduduki posisi legislatif ataupun eksekutif. Artinya, ketika membicarakan hal Aceh, kita berharap dan saya berharap tidak seolah-olah bebannya partai Aceh. Jadi, ini harus ke semua partai nasional, atau pimpinannya atau angotanya yang menduduki di kursi legislatif baik di DPR Kota maupun provinsi ini harus ada sebenarnya jiwa ke Acehannya, untuk menyelesaikan masalah Aceh yang sudah diambang pintu menuju kesejahteraan secara umum. Baik itu pendidikan, infrastruktur dan ideologi dan sebagainya. Itu menurut saya tentang komunikasi. Kalau saya pribadi ya memang tidak pandang bulu. Karena partai nasional ini juga berhak dan harus berbicara dan mementingkan masalah Aceh. Jadi, pascakonflik dan pascadamai ini Aceh ketika maju atau tidak majunya, sejahtera atau tidak sejahteranya Aceh kita yang melihat dan merasakannya sendiri.”

Melihat situasi saat ini, perolehan suara yang besar dari partai lokal serta misi dari kehadiran partai lokal masih sangat sulit untuk menjadi sebuah alasan partai tersebut untuk satu suara dengan partai-partai nasional.

” Kalau untuk mempengaruhi, ada pengaruhnya memang seolah-olah tidak bisa ada ayam jago di Aceh, kalau kita bicara pengaruh. Tapi sebenarnya, kita bilang penaruh ya pengaruh. Dengan adanya partai lokal dan juga adanya partai nasional ini, seperti kita bilang tadi memang kebersamaan dan bersama untuk memikirkan masalah Aceh. Tapi ketika partai nasionalnya ada, bila memang mereka membuang badan kepentingan Aceh, di situlah pengaruhnya. Menurut saya begitu. Karena ketika

membedakan ini Aceh urusan PA saja. Kami tidak ada urusan. Itu pengaruh. Tapi kalau berbicara bersama untuk memikirkan masalah Aceh apapun judulnya, kesejahteraan, atau pembangunan, sebagainya ketika bersama tidak ada pengaruh. Artinya kebersamaan mengatasnamakan orang Aceh, rakyat Aceh, dan legislatif Aceh walaupun di partai nasional.”

Begitupun komunikasi kepada pemerintah Aceh. Kondisinya hampir serupa dengan komunikasi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal ini dikatakan Tgk Panyang sebagai berikut.

“Tidak jauh berbeda gambarannya. Kalau pemerintahnya dipimpin oleh orang dari partai nasional, maka pertentangan juga terjadi. Selalu ada yang tidak sejalan. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga orang Aceh. Tapi tidak mau untuk bersama-sama menegakkan lagi nilai-nilai lokal yang memang harusnya ada di Aceh.”

Perbedaan kelompok partai, tidak membuat Tgk panyang merusak komunikasinya terhadap konsituen.

“Tetap terjalin. Kami selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya selalu turun, baik dalam reses, kunjungan kerja atau menerima mereka langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk rapat dengar pendapat.”

Meskipun sudah terlihat ketidak kompakannya antara partai nasional dengan partai lokal, tetap saja partai lokal tidak dapat memaksa agar partai nasional ikut dalam keputusan dari partai lokal. Tgk Panyang menjelaskan sebagai berikut.

“Sebenarnya beginilah lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya. Karena, ketika ini lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya dengan adanya partai nasional di Aceh. Sebenarnya, kita berharap semua partai nasional mendukung keputusan yang ada di partai Aceh. Jadi, ketika kursi periode ketiga ini, dari 32, 29, tinggal 18 ini pengaruh memang. Jadi, di sinilah kita berharap, di parlemen partai aceh lebih 50:51 untuk menyelesaikan hal-hal kepentingan Aceh dalam berkaitan politik ataupun hal-hal lainnya. Jadi ketika partai nasional tidak mendukung apa keputusan PA, jadi partai Aceh bisa mengambil keputusan dalam paripurna, ketika parlemen dikuasai 50:51. Dari sini memang lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya. Kita melakukan ini untuk memberi pemahaman. Sebenarnya mengerti sudah mengerti, malah mereka lebih mengerti daripada kita. Cuma setuju

atau tidaknya mereka. Di sinilah lahir pengaruh tidak pengaruhnya. Tapi kebersamaan harus diutamakan, pemahaman Aceh sudah mereka tahu. Gimana Aceh sebenarnya, dan gimana semasa Iskandar Muda, gimana sebelumnya dan gimana sekarang. Apa maksud PA apa maksud perjuangan Aceh di sinilah. Kita mengulang ke belakang, yang merasakan imbasnya, bukan orang GAM, dan bukan orang PA tapi masyarakat Aceh secara umum.”

4.1.4. Hambatan Komunikasi

1. Wawancara Ketua Fraksi Partai Gerindra

Abdurrahman memang tidak secara terbuka menyampaikan bahwa dalam komunikasi yang dilakukannya mengalami kendala. Namun, peneliti menemukan pernyataan-pernyataan dari Abdurrahman yang menunjukkan terdapat hambatan-hambatan yang membuat komunikasinya sebagai politisi dari partai nasional. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat memberi jawaban terkait dengan hubungan komunikasi seperti apa yang dibangun.

“Ya, kita terus berkomunikasi. Dan selama ini komunikasi itu tidak ada hambatan apa-apa. Hanya saja mungkin ada beda tekanannya. Partai lokal, kita komunikasi mereka lebih tertarik kita berbicara persoalan-persoalan keAcehan, persoalan-persoalan Aceh secara khusus. Kalau bicara nasional, mungkin hal kekhususan itu tidak menarik. Jadi, kita lebih bersifat ke umum, bukan lokal. Meskipun lokal kita bicarakan. Karena walaupun nasional, yang duduk orang Aceh. Namun demikian, kelihatannya, bagi partai nasional isu-isu khusus itu ke pusat kurang menarik. Jadi, isu-isu yang didiskusikan bersifat nasional. kandungan lokal lebih menarik, lebih *nyambung* dan lebih cair diskusi kalau kita angkat isu-isu kekhususan Aceh. Namun, selama ini diskusi kita tidak ada hambatan.”

Jawaban Abdurrahman menunjukkan adanya hal yang menarik dan tidak menarik untuk menjadi bahan diskusi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai nasional dengan anggota partai lokal. Hal ini pun diperjelas oleh Abdurrahman sebagai berikut:

“Ketika membicarakan isu-isu khusus itu ada. Kalau bicara isu khusus Aceh, partai lokal lebih fokus masalah itu. Ada kalanya nasional tidak menarik. Contoh ketika berbicara masalah bendera, kalau partai nasional tidak begitu menarik, tapi lokal satu-satunya yang harus diperjuangkan. Seperti hal lainnya, seperti masalah keuangan, sama-sama mendukung Tapi kalau masalah lebih khusus kewenangan lebih hidup dan lebih menarik dibahas partai lokal.”

Biasanya, intensitas dalam komunikasi yang dibangun juga dapat menimbulkan efek bagi kedua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berasal dari partai nasional maupun partai lokal. Hal itu pasti terjadi sebagai efek dari sebuah komunikasi yang dilakukan. Abdurrahman pun menjawab sebagai berikut.

“Secara kepartaian, secara fraksi tidak sampai ribut. Tapi kalau beda pendapat ada. Tapi itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi lembaga politik seperti ini. Tapi sampai ribut-ribut, tidak. Masih bisa dinetralisir. Seperti bahas bendera. Kalau partai lokal menginginkan seperti itu. Kalau partai nasional, harus ada ruang diskusi, tapi gak ribut.”

Seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman, bahwa setiap perumusan kebijakan memerlukan peretujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lainnya. Ia mengetahui bahwa setiap kebijakan, pasti ada pihak-pihak yang tidak sependapat. Untuk itulah, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut.

“Ya kalau terjadi beda terjadi ketidak sepahaman, kita akan melakukan lobi-lobi, pendekatan dengan secara pribadi. Kalau di sini kita dekati ketua fraksi, kita bisikkan ketua fraksi, kita berikan pemahaman menurut pandangan kita, dan kita juga harus mendengar pendapat dari teman yang berbeda pandangan tadi. Kalau dengan ketua fraksi belum bisa tercapai kesepakatan itu, kalau memang itu harus digolkan, harus diselesaikan maka kita akan mengajak pimpinan partai berdiskusi. Kalau di tingkat pimpinan partai belum selesai, maka kita mengarah ke pendapat mayoritas.

Kalau pendapat mayoritas belum selesai, maka *voting* kebijakan. Tapi, *voting* kebijakan sampai sekarang belum terjadi.”

2. Wawancara Ketua Fraksi PKS, Zaenal Abidin, S.Si

Ketua Fraksi PKS, Zaenal Abidin, S.Si sendiri mengakui bahwa terdapat perbedaan garis yang nyata di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh antara partai nasional dan partai lokal memiliki kepentingan yang sama namun dengan jalan berbeda. Perbedaan ini yang terkadang dirasakan oleh Zaenal muncul saat berkomunikasi.

“Kalau berbeda pendapat ada, tapi kita mencoba mencari titik temu, mencari kesamaan agar dinamika ini menjadi sebuah hal yang niscaya lah. Sebuah hal yang kita dapatkan pada saat kita berkomunikasi dengan partai lokal.”

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zaenal mengaku sering terbentur saat melakukan komunikasi dengan pemerintahan Aceh. Salah satu contohnya, berkaitan dengan kebijakan anggaran yang selalu tidak sesuai dan dipaksa untuk dijalankan. Zaenal tetap mencoba melakukan komunikasi yang intensif. Meskipun pada akhirnya tidak mendapatkan perubahan apapun.

“Komunikasi ini penuh dinamika, kita pernah mengalami APBA dalam bentuk Pergub tahun 2018 pada masa awal Irwandi. Inipun terjadi padahal kita mencoba komunikasi intensif, secara baik tapi tidak ada titik temu. Ini salah satu contoh dinamika. Tapi, pada prinsipnya, kita dengan pemerintah provinsi tetap jalan.”

Persoalan-persoalan yang ditemui di tengah-tengah masyarakat, mayoritas berhubungan dengan pemerintah kabupaten, sementara posisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berada pada tingkat provinsi. Meskipun demikian, aspirasi yang

ditampung tetap dibawa dan diperjuangkan oleh Zaenal ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk diteruskan ke pejabat terkait.

“Kalau keluhan mereka banyak. Karena keinginan masyarakat sangat banyak. Kita kadang terbentuk dengan tupoksi pemerintah provinsi dan tupoksi kabupaten. Banyak keinginan masyarakat itu bersifat tupoksi kabupaten. Keinginan masyarakat lebih banyak menjadi tupoksi pemerintah kabupaten. Kita cari jalan tengah agar kita bisa memenuhi keinginan masyarakat. Alhamdulillah, informasi yang kita dapatkan untuk tahun depan, kita di provinsi bisa mengadvokasi usulan-usulan yang bersifat keinginan masyarakat. Jadi, kalau masalah pasti ada.”

Jika kebijakan terbentur dengan ketidak sepehaman dari masing-masing anggota partai nasional dan partai lokal, maka dikatakan Zaenal harus diterima dan dipahami bahwa masing-masing orang dari latar belakang berbeda. Meskipun demikian, tetap harus mencari kesepakatan bersama.

“Pada prinsipnya ini hal yang wajar pada saat membuat kebijakan. Setiap kebijakan banyak interpretasinya. Nah, kita tetap mencari hal yang menjadi kesepakatan bersama. Walaupun persamaan itu sangat sedikit dari perbedaan.”

3. Wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari PNA, Tgk Samsul Bahri (Tgk Tiyong)

Bagi Tgk Tiyong, komunikasi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai politik lokal dan partai politik nasional tetap menunjukkan perbedaan karena perbedaan kepentingan politik. Meskipun begitu, Tgk Tiyong tidak menganggap hal tersebut sebagai penghalang dirinya untuk tetap melakukan komunikasi. Baiknya jalinan komunikasi Tgk Tiyong dengan anggota legislatif lain, tidak tercipta dalam komunikasi terhadap pemerintahan Aceh. Karakter Tgk

tiyo yang kritis menjadi penyebab tidak terbukanya komunikasi terhadap pemerintahan pimpinan Nova Iriansyah.

“Untuk sementara tidak ada hubungan sama sekali. Ini kan harus jujur. Tapi, kita kembali kepada fungsi kita. Kita adalah pendukung pemerintah, pengkritik pemerintah bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi pemerintah harus introspeksi diri. Apa yang tertuang dalam visi misi yang sekarang menjadi RPJM, itu tanggungjawab pokok yang harus diselesaikan. Walau tidak 100%, tapi setidaknya berjalan dari tahun ke tahun hingga akhir periode 5 tahun.”

Meskipun begitu, Tgk Tiyong tetap membuka diri untuk menerima dan menyampaikan pesan-pesan mengenai pembangunan atau persoalan masyarakat di Aceh, langsung melalui aparaturnya pemerintah terkait.

“Mungkin mereka ada perwakilan di SKPA, ada perwakilan tim anggaran pemerintah Aceh yang mereka komunikasi langsung ke DPR. Di sana, ini pemerintah ada Sekda, ada Bappeda, ada badan keuangan, juga asisten merupakan perpanjangan Gubernur atau perpanjangan tangan pemerintah Aceh. Kita bisa berkomunikasi dan mereka bisa menyampaikan langsung ke pimpinan mereka, ini-ini yang kebutuhan yang *urgent*, dan kebutuhan-kebutuhan ini yang perlu diakomodir di dalam APBA itu sendiri.”

4. Wawancara Ketua Fraksi Partai Aceh, Tgk Tarmuzi (Tgk Panyang)

Berbeda dengan Tgk Panyang, perbedaan antara partai politik lokal dan partai politik nasional diakuinya secara jelas. Ketidakcocokan diantara kedua kelompok partai sudah berlarut. Hal itulah yang dirasakan oleh Tgk Panyang sejak menduduki bangku legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa perbedaan paham tersebut tidak sampai menyebabkan benturan fisik.

“Di dalam parlemen ataupun di dalam internal lainnya, mengarah ke bentrok tidak kita inginkan. Tapi pemahaman ini dari media, dari orang tua atau tokoh lainnya, tahu persislah masalah Aceh sebenarnya. Jadi, pernah bentrok, tidak pernah memang. Dan kita tidak berharap hal ini terjadi.

Tetapi ketika mereka agak asing ketika membicarakan masalah Aceh, agak merasa tidak memiliki, ini seharusnya kita harus melakukan yang memaksa. Di sini harus. Karena ketika membicarakan masalah Aceh dan kesejahteraan dan sebagainya, itulah dibidang tadi bukan hanya tanggungjawab PA saja. Ini kepentingan bersama.”

Biasanya konflik-konflik kecil yang terjadi karena perbedaan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sering terjadi karena memang hadirnya partai lokal membawa beberapa misi yang dianggap tidak sejalan dengan keberadaan partai nasional. Padahal, menurut Tgk Panyang, adanya partai lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan sejarah dan tuntunan Islam.

“Kita tetap langkah lembaga dan langkah pimpinan partai. Itulah, sebenarnya pemahaman ini harus diakui. Memang sudah paham, tapi jangan takut dengan pimpinan di pusat. Ini bukan lambang PA. tapi, ini simbol Aceh. Ketika membicarakan kepentingan bendera Aceh ini mereka ataupun partai nasional yang ada di Aceh mendukung saja apa keputusan Partai Aceh untuk menyelesaikan bendera Aceh dan lain-lain, butir-butir MoU TNI dengan GAM tempo lalu. Jadi, ketika bicara kepentingan, bendera dan butir MoU lainnya diharap kebersamaan antara partai lokal dan harus didukung oleh partai nasional. Harus dipaksa. Sebenarnya mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu.”

Saat-saat seperti itulah, yakni saat berbicara tentang isu lokal kedua kelompok partai selalu tidak bergandeng tangan. Meskipun demikian, diantara kedua kelompok partai cepat melakukan peredaman emosi.

“Itu kan ada dua porsi. Kalau di internal pastinya kita merujuk pimpinan atau panglima, kalau di internal PA. kalau di lembaga, pastinya kita berharap pimpinan partai lokal dan nasional berembuk dan mencari solusi apa permasalahan ketika ada keributan dan apa masalah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan Aceh lainnya. Jadi, di sini harus dilibatkan ketua pimpinan partai baik loka maupun nasional, bila ada kesalahpahaman kepentingan politik secara lembaga.”

Tgk Panyang sendiri tidak memahami hambatan seperti apa yang membuat komunikasi yang buruk diantara kedua kelompok partai di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun, ia menyadari bahwa adanya perbedaan kelompok partai membuat masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bertahan untuk tetap pada kepentingan kelompoknya. Seperti yang dijelaskan oleh Tgk Panyang sebagai berikut

“Hambatannya tidak nampak. Yang kita tahu, ada dua lembaga di Aceh. Eksekutif dan legislatif. Dari sinilah, jangan terjadi salah paham dan masing-masing kepentingan di sini, masalah anggaran dan sebagainya. Jangan nampakkan di publik bahwa nasional dan lokal. Ketika berjalan bersama menjalankan sebagai fungsi masing-masing, kita dua lembaga ini menjadi satu, pasti segala urusan keAcehannya lancar seperti politik, butir-butir perjanjian kayak dibidang tadi masalah bendera, masalah anggaran sekarang juga. Karena kita memikirkan masalah Aceh dalam segi manapun, dalam segi apapun. Jadi, untuk penghambat tidak lahir penghambat. Seperti kita bilang, bahwa mereka lebih paham dari kita. Dari sini, kita berharap ada partai nasional di Aceh untuk Acehlah. Walaupun kepemimpinan dasarnya ada di pusat. Saya berharap semua partai politik nasional dan lokal di Aceh, yang sudah menduduki lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saya berharap. Di paripurna pun saya beri pemahaman bahwa Aceh milik bersama, bukan milik GAM, bukan milik PA. Ketika itu kita utarakan, bukan hanya satu hal saja, masalah anggaran, tapi juga masalah politik. Jakarta serakng suda memberi hak untuk kita di sini bagaimana mengurus diri sendiri. Tapi harusnya mengharap dari semua partai nasional yang dari Aceh dan tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta. Itulah namanya satu payung. Satu hal lagi yang penting adalah masalah Wali Nanggroe. Masalah anggaran Rp.35 milyar besar, itu tidak besar. Malah lebih sedikit. Karena lembaga Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini sudah diistimewakan untuk Aceh, untuk mengistimewakan masyarakat Aceh, bukan hanya GAM.”

4.2. Pembahasan

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki sistem kepartaian berbeda dari daerah lain. Pesta demokrasi khususnya pada pemilihan legislatif di

Aceh pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak hanya diikuti oleh partai-partai nasional melainkan juga partai lokal, seperti Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daulat Aceh dan Partai Sira. Sehingga, di Provinsi Aceh khususnya di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, partai-partai yang ada dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu partai lokal dan partai nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mengatur tentang fungsi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berupa fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka dinamika komunikasi antara partai politik lokal dan partai politik nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Dinamika Komunikasi Fungsi Legislasi

Jimly Assidique (2009: 300) menyatakan bahwa fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut empat kegiatan berupa:

1. Prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*)
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (*law making process*)
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*)
4. Pemberian persetujuan pengikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding document*)

Melalui fungsi legislasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memegang kekuasaan dalam membuat peraturan, kebijakan daerah atau orang Aceh lebih mengenal istilah qanun. Di sisi lain, pembuatan dan pengesahan qanun tersebut telah diatur dalam UUPA pasal 23 ayat (1), yang mengharuskan mengikutsertakan Gubernur Aceh untuk membahas dan memberi persetujuan bersama terhadap qanun yang akan dilahirkan. Selain itu, qanun (Ranggawidjaya, 1998: 43-45) juga harus sesuai dengan hirarki dan kapasitasnya, serta tidak boleh kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diperjelas dalam UUPA pasal 235, dimana pemerintah melaksanakan pengawasan sesuai peraturan Perundang-undangan dan dapat membatalkan qanun jika bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan antar qanun dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Data yang peneliti dapatkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh telah melahirkan berbagai qanun setiap tahunnya. Keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam mengesahkan qanun menjadi bukti keberhasilan fungsi legislasi yang harusnya dilakukan. Keberhasilan ini pun tidak sekadar melihat jumlah qanun yang disahkan saja, melainkan melihat rancangan qanun (raqan) dalam program legislasi (prolega) prioritas dengan capainnya. Adapun jumlah prolega prioritas qanun dan jumlah qanun yang disahkan (20014-2019) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 4.1. Rancangan Qanun Prolega Prioritas dan Qanun Disahkan Tahun 2014-2019

Tahun	Rancangan Qanun Prolega Prioritas	Qanun Disahkan
2011	31	6
2012	23	15
2013	21	19
2014	12	12
2015	13	9
2016	15	13
2017	15	12
2018	22	17
2019	24	11

(Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Januari 2020)

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tidak semua ragan prolega priotitas dapat disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang dijalankan kurang maksimal. Padahal, agenda untuk mengesahkan raqan prolega pioritas sudah dijadwalkan dengan baik namun tidak juga terlaksana. Bahkan, rancangan qanun itu sendiri dibuat dengan suatu proses. Mulai dari pembuatan naskah akademik yang memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis dan lingkup materi yang akan diatur di dalamnya. Rancangan qanu sendiri bukan sekadar usulan dari pemerintah Aceh ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau sebaliknya. Sehingga, keduanya harus melakukan komunikasi untuk membahas dan memahami tentang apa serta tujuan dari qanun

yang dibuat. Beberapa alasan yang membuat terhambatnya proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh adalah perbedaan pendapat antara sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maupun dengan pemerintah Aceh. Bahkan, dari semua qanun yang disahkan tersebut tidak semuanya berasal dari inisiatif anggota dewan.

Diterima atau ditolaknya qanun bukan karena ketidakmungkinan qanun untuk diterbitkan, tapi dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dan kepentingan dari kelompok partai. Peneliti juga menganalisis dari semua qanun yang gagal disahkan, terdapat satu qanun yang belum tuntas dan masih menjadi kontroversial, yaitu qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang bendera dan lambang Aceh. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan, hingga saat ini qanun bendera masih menimbulkan tanda tanya bagi semua orang. Meski qanun ini ditolak, namun pemerintah pusat tidak memberikan ketegasan terhadap qanun tersebut. Bahkan, sesama anggota dewan tidak satu kata untuk memperjuangkan atau menghentikan perjuangan qanun bendera dan lambang Aceh. Peneliti melihat, persoalan bendera dan lambang Aceh masih dianggap sebagai isu lokal yang tidak menarik bagi kelompok partai nasional. Sementara itu, isu bendera dan lambang Aceh menjadi hal yang wajib diteruskan bagi kelompok partai lokal. Di sini, sudah tampak terjadinya ketidakcocokan diantara kelompok partai yang berbeda. Dengan kata lain, tidak adanya kemauan dari masing-masing kelompok partai untuk saling mendukung agar UUPA yang diperjuangkan oleh partai lokal dapat teralisasi. Bukan hanya qanun bendera dan lambang Aceh, tidak disahkannya

rajan proleg prioritas menunjukkan bahwa kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum terwujud sepenuhnya.

4.2.2. Dinamika Komunikasi Fungsi Anggaran

Fungsi kedua dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah fungsi anggaran. Dalam fungsi ini, anggota dewan melakukan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bersama-sama dengan pemerintah Aceh. Menurut Mardiasmo (2002: 81), makna anggaran dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, secara etimologis, anggaran berasal dari bahasa Belanda yakni *begrooting* yang berarti mengirakan dan dalam bahasa Inggris disebut *budget* yang berarti anggaran, dan dalam bahasa Indonesia disebut anggaran yang berarti kira-kira atau perkiraan. Kedua, dalam arti statis merupakan rencana yang menggambarkan perkiraan jumlah uang penerimaan dan pengeluaran, serta pembiayaan (dalam bentuk angka-angka) yang tidak menunjukkan hasil apa yang akan dicapai. Ketiga, dalam arti dinamis yang dimaksud, anggaran adalah:

1. Rencana keuangan yang menterjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Rencana keuangan pemerintah daerah untuk membangun perikehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan, untuk mendorong rakyat dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara.

3. Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang.

Hasil analisis peneliti, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai lokal maupun dari partai nasional telah menjalankan fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak sama dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hanya memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh pemerintah Aceh. Meskipun begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat mengusulkan dana program pembangunan daerah pemilihan atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Untuk meloloskan anggaran tersebut, terjadi dinamika komunikasi antara anggota dewan dengan pemerintah Aceh. Dimana pemerintah Aceh harus mengajak para pimpinan komisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk duduk bersama membahas persoalan ini. Tidak hanya pemerintah saja yang berbicara, melainkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga aktif memberikan usulan atau komentar terkait usulan dari pemerintah Aceh.

Pembicaraan mengenai anggaran tersebut tidak segampang yang dibayangkan atau selesai sekali duduk saja. Dalam rentetan sejarah pemerintahan di Aceh, pengesahan APBA selalu telat untuk diketuk. Hal ini disebabkan adanya

kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir memakai anggaran yang akan disahkan. Seperti pada tahun 2015 silam. Dimana pemerintah Aceh mengusulkan Rancangan (R) APBA sebesar Rp. 11.5 Triliun. Usulan tersebut secara mentah ditolak oleh legislatif. Pasalnya, pemerintah Aceh tidak mengakomodir dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp. 1.5 triliun. Contoh lain, Ketua Fraksi PKS bahwa sebagai anggota dewan, ia menemukan kendala dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga mengusulkan untuk pembuatan rumah sakit regional dengan anggaran Rp. 100 Juta. Meski disetujui, anggaran yang diminta tidak dengan nominal yang dicanangkannya.

Sama seperti pengesahan qanun, pengesahan anggaran juga memerlukan kesepakatan dan melihat pemegang kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Jika Pemerintahan dipimpin dari garis partai lokal dan legislatif mayoritas diduduki oleh oleh partai lokal, maka anggaran yang diusulkan akan lebih mudah lolos. Seperti pada tahun 2014 silam, pada masa pemerintahan Zaini Abdullah yang menganggarkan Rp. 600 Milyar dari APBA untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

4.2.3. Dinamika Komunikasi Fungsi Pengawasan

Fungsi ketiga dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh berupa pengawasan politik. Artinya, pengawasan yang dilakukan dilengkapi dengan beberapa hak seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh untuk meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk menyatakan pendapat merupakan hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden.

Pengawasan dilakukan agar membantu dijalanannya qanun, penganggaran serta sistem pemerintahan di Aceh secara baik dan jauh dari penyimpangan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pemerintahan Aceh memiliki pola komunikasi yang sejajar dengan kepala daerah. Analisis peneliti, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah melakukan pengawasan terhadap qanun yang dilahirkan maupun anggaran yang ikut mereka sahkan. Pengawasan yang mereka lakukan dalam berbagai bentuk seperti dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, reses atau sebagainya. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hampir tidak terdengar mengalami konflik dan tampak baik-baik saja. Hal ini, disebabkan pengawasan formal dari anggota dewan tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lainnya, baik dari partai lokal maupun dari partai nasional. Sementara sasaran dari

pengawasan adalah Pemerintah Aceh, BUMD dan instansi maupun perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta yang ada di Aceh.

Hasil wawancara terhadap empat informan, komunikasi yang terjadi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, lumrahnya sama seperti apa yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, yaitu *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* atau siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Analisa peneliti, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki potensi yang sama untuk menjadi komunikator. Sebab, sesuai dengan fungsi legislatif yang dimilikinya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara mengemukakan informasi, opini, perasaan (seperti rasa tidak sependapat, rasa marah, rasa ragu dan lainnya) sebagai sebuah pesan yang disampaikan. Pada umumnya, pesan politik yang mereka buat disampaikan melalui dua macam saluran (Cangara, 2009: 33). Pertama, saluran komunikasi kelompok, misalnya melalui jalur fraksi atau komisi. Biasanya saluran tersebut digunakan saat dalam berkomunikasi secara tatap muka, seperti saat rapat-rapat maupun diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kedua, saluran komunikasi publik misalnya, aula, balai desa, alun-alun dan sebagainya. Saluran kedua ini biasa digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan kunjungan kerja, reses dan sebagainya.

Melalui kedua saluran tersebut, maka pesan akan ditujukan kepada komunikan. Peneliti melihat bahwa yang menjadi komunikan ada tiga, yaitu

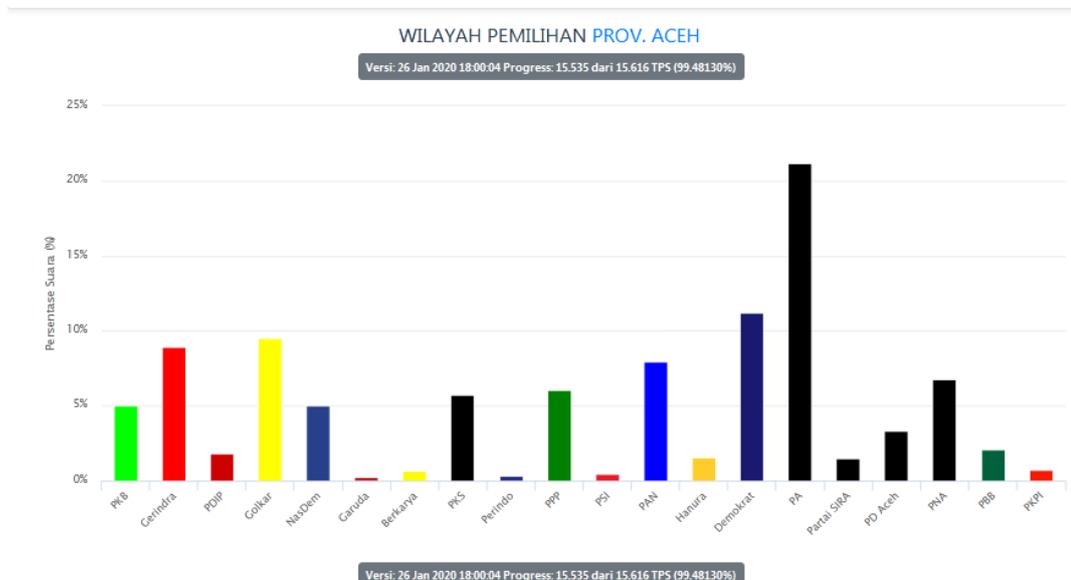
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu sendiri, pemerintah dan masyarakat. Pesan yang diterima oleh komunikan diharapkan dapat menciptakan pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, kesepakatan bersama terhadap kebijakan maupun pencarian solusi atas problema yang menjadi kepentingan masyarakat.

Perbedaan kelompok partai yang ada membuat komunikasi diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memunculkan komunikasi yang menarik. Dimana komunikasi antara partai lokal dengan partai nasional terbatas. Partai nasional tidak akan memasukkan diri untuk melakukan komunikasi terhadap hal-hal atau kebijakan yang berskala lokal. Sebaliknya, partai lokal akan menarik diri untuk membahas persoalan dengan ruang lingkup nasional.

Hal ini dapat dipahami melalui sejarah kemunculan partai lokal di Provinsi Aceh, setelah terbitnya MoU Helsinki Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimana dalam butir (1) penyelenggaraan pemerintah di Aceh di poin (1.2) partisipasi politi dijelaskan bahwa:

“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah Republik Indonesia, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.” (Hamid, 2006: 511)

Keberadaan partai politik lokal di Aceh membawa pengaruh besar dan memegang kendali di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal itu disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai lokal, yang dapat dibuktikan dengan perolehan suara tertinggi pada pemilihan legislatif.



Gambar 4.2. Perolehan suara legislatif wilayah pemilihan Provinsi Aceh (Info Pemilu, Januari 2020)

Gambar 4.2. menunjukkan perolehan suara partai lokal yakni Partai Aceh sebagai partai lokal mendulang suara terbanyak (21.16%) mengalahkan suara partai nasional. Dengan perolehan suara ini, menempatkan partai lokal sebagai pemegang pengaruh besar di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sesuai dengan tujuan utamanya, partai lokal berusaha melakukan upaya untuk memperjuangkan aturan berasas kearifan lokal yang sebenarnya telah dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun

2006 serta dipertegas dalam Qanun Aceh atau peraturan daerah yang mengatur tentang tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh.

Perjuangan partai lokal ini pada kenyataannya tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan tidak adanya keinginan antara kedua kelompok tersebut untuk menjalin komunikasi yang terbuka. Hal ini nampak dari jawaban informan dalam penelitian, yakni Drs. H. Abdurrahman Ahmad dan Zaenal Abidin S.Si. Dalam jawaban mereka yang menyatakan bahwa komunikasi antara partai nasional dan partai lokal baik-baik saja, ternyata tidak pada setiap waktu. Apalagi ketika adanya pembahasan isu-isu lokal. Kedua kelompok partai ini membatasi diri dalam untuk persoalan tersebut.

Isu yang paling kontroversial dan belum mendapat titik temu adalah persoalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Terkait Qanun tersebut, peneliti menemukan data sebagai berikut:

“Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 telah membatalkan dan mencabut beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.” (Serambi, 2 Agustus 2019)

Partai lokal memperjuangkan diberlakukannya Qanun Bendera karena menganggap hal tersebut merupakan hak otonomi yang diberikan pemerintah Indonesia melalui UUPA Pasal 246 ayat (2) bahwa selain bendera merah putih, pemerintah Aceh dapat menentukan dan memutuskan bendera dan lambang daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dalam Ayat (3) menjelaskan bahwa bendera sebagai lambang yang

dimaksud bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Yang menjadi polemik adalah bendera dan lambang yang diajukan oleh partai lokal adalah bendera dan lambang yang persis dengan bendera serta lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal semacam inilah yang kemudian disikapi oleh partai nasional sebagai sebuah bahasan dilema. Mereka tidak menolak tapi juga tidak menerima. Sehingga Qanun Bendera dan lambang tersebut tidak diperjuangkan oleh partai nasional yang sebagai partai yang memiliki jaringan kuat di tingkat pusat.

Komunikasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga tidak hanya sebatas pada sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saja, melainkan kepada pemerintah dan masyarakat khususnya dengan para konsistuen. Hasil wawancara dan analisis peneliti, komunikasi terhadap pemerintah juga terjadi kesenjangan. Hal ini disebabkan oleh kubu kelompok partai politik yang berbeda antara keduanya. Dimana pemerintahan saat ini dipimpin oleh Ir. Nova Iriansyah, MT yang bersandar pada bendera partai Demokrat atau kelompok partai nasional. Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintahan Aceh terus bertolak belakang dan bertahan pada kekuasaan masing-masing. Bukti dari kontroversi mereka ini peneliti temukan dalam pemberitaan di tahun 2017 dengan judul pernyataan Wagub Aceh dinilai memancing keadaan, Abdullah Saleh: Kenapa Nova Iriansyah Menyerang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

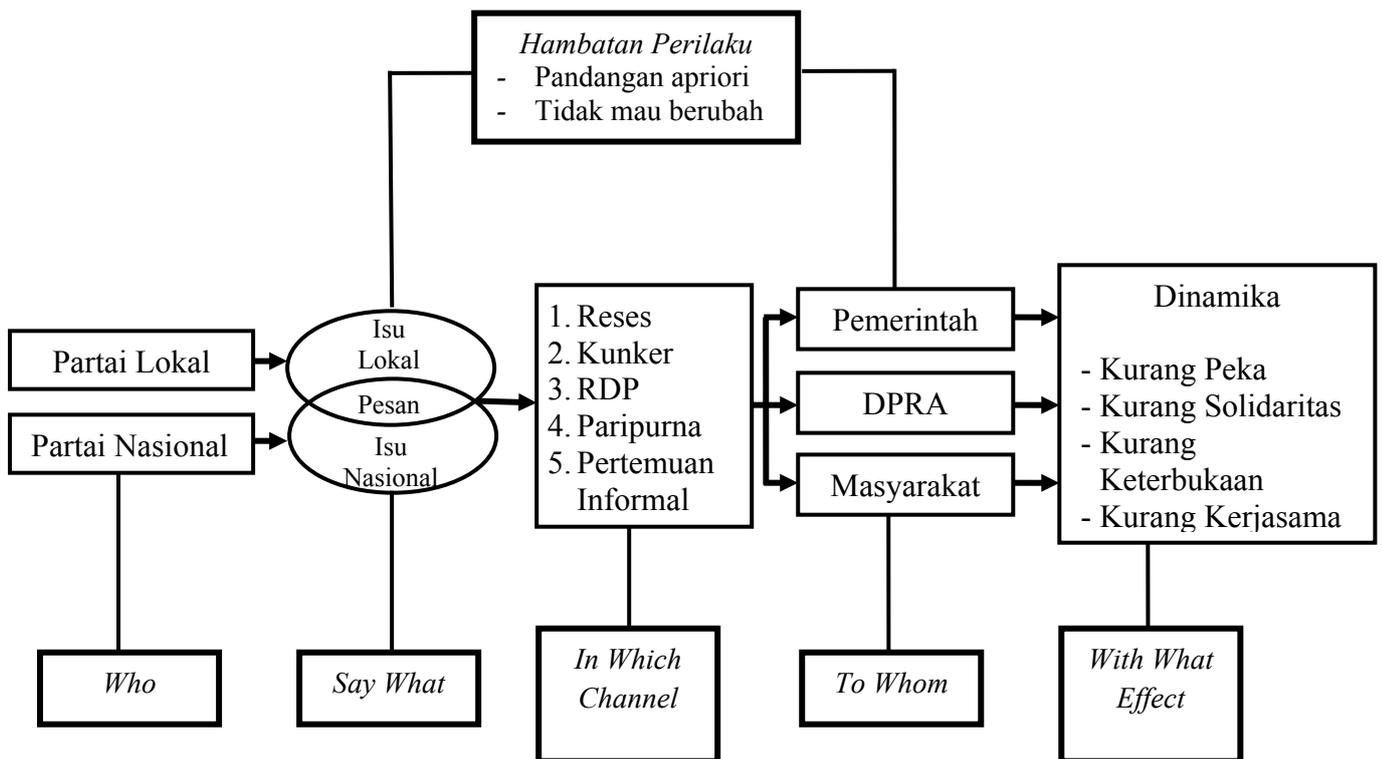
“Nova mengatakan, partai pendukung pemerintah saat ini belum bisa mengalahkan partai penguasa. Dia berharap, PNA, PDA dan PKB bisa menambah kursi dan PDIP juga bisa mengirim perwakilannya ke DPRA. Tentu dengan tidak mengurangi jatah Demokrat. “Di DPRA, merah harus

dilawan dengan merah. Biru, kuning, biru muda, hijau belum cukup mampu, jadi kami butuh merah, merah yang lain (PDIP),” pungkasnya.” (modusaceh.co, 20 Agustus 2019)

Kutipan pernyataan Nova Iriansyah menunjukkan dengan jelas bahwa untuk melanggengkan misi politik dan program pemerintahan yang dijalankannya, Nova Iriansyah butuh dukungan dari kursi yang dapat mengalahkan partai partai lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sementara itu, untuk komunikasi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan para konsistuenya tetap berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Jalinan komunikasi dengan para konsistuen dilakukan dengan reses, kunjungan kerja, dan rapat dengar pendapat.

Komunikasi yang tidak langgeng antara sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemerintah menyebabkan model komunikasi yang dibangun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap konsistuen juga tidak maksimal. Sehingga fungsi DPR sebagai wakil rakyat hanya sebatas formalitas mengikuti agenda yang sudah dibuat oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Fungsi pengawasan lebih banyak terfokus pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja yang berorientasi pada proyek fisik. Padahal, fungsi pengawasan yang diharapkan untuk dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah pengamatan yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi berdasarkan kepentingan masyarakat Aceh. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat atas fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dapat menjadi tawar menawar atau suka dan tidak suka untuk dilakukan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga lupa untuk memanfaatkan

keberadaan media massa secara maksimal, termasuk keberadaan website milik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang jarang diisi dengan aktivitas serta hasil kinerja dari 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Padahal, dengan memaksimalkan keberadaan media massa dan website milik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat menjadi salah satu cara untuk menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat melalui pemberian informasi aktivitas nyata yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.



Gambar 4.3. Model dinamika komunikasi partai nasional dan partai lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Peneliti, Januari 2020)

Peneliti melihat ada hambatan komunikasi yang terjadi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sehingga menyebabkan konflik serta hidupnya dua kubu partai yang saling menunjukkan eksistensi dan kekuatannya masing-masing (kubu partai nasional dan kubu partai lokal. Hal ini ditengarai oleh pembagian kewenangan yang belum tegas diatur oleh pemerintah. Dimana diketahui bahwa Aceh sendiri ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah otonomi khusus atau dikenal dengan nama lain *symmetric decentralization*. Berdasarkan keputusan tersebut, maka wilayah Aceh diberi kebebasan untuk mengatur hak, wewenang, dan kewajiban wilayahnya. Termasuk dengan diizinkan tumbuh partai lokal di Aceh. Selain untuk meredam gejolak, partai lokal dimaksudkan agar Aceh untuk menyuarakan suara kedaerahaan. Namun, melihat kondisi yang ada, keberadaan partai politik lokal yang berbarengan dengan partai nasional membatasi ruang gerak partai lokal di Aceh untuk melaksanakan program-program atau pengawasan yang akan mereka canangkan. Hal ini juga ada kaitannya dengan konteks kewenangan otonomi khusus yang diberikan. Secara tidak langsung, pemerintah pusat masih melakukan intervensi sebagai bentuk monitoring agar stabilitas pemerintahan di Aceh tetap terjadi, mengingat pernah terjadinya konflik di Aceh. Namun, di sisi lain keadaan tersebut sebenarnya membuat buruk komunikasi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemerintahan Aceh itu sendiri. Perbedaan kelompok partai yang ada dipahami oleh masing-masing orang sebagai bentuk kompetisi bukan sebagai koalisi yang berpikir untuk membangun Aceh secara bersama. Masing-masing

dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merasa benar dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lain yang berlainan kelompok, atau disebut dengan pandangan apriori. Seperti yang diungkap oleh informan dalam penelitian ini, setiap kebijakan atau persoalan yang diperjuangkan oleh partai lokal akan didengar namun partai lokal mengaku bahwa partai nasional tidak mau menindak lanjuti persoalan mereka yang condong mengandung isu lokal. Karena perlakuan tersebut, partai lokal pun melakukan hal yang sama dengan tetap memperjuangkan isu lokal dan mengesampingkan isu-isu nasional, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai lokal merasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai nasional tidak mau membantu perjuangan mereka. Kondisi seperti ini terus dipertahankan dalam setiap periode pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dampaknya, dinamika komunikasi dengan indikator kepekaan, solidaritas, keterbukaan dan kerjasama tidak berjalan dengan maksimal. Hambatan ini disebut dengan hambatan perilaku. Hal ini juga berpengaruh terhadap fungsi legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang tidak berjalan maksimal karena hanya mengurus kepentingan dan konflik kelompok partai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Dinamika komunikasi antara partai politik nasional dan partai politik lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah terjadi perbedaan kelompok partai yang ada memunculkan komunikasi yang dinamis. Sebab, hanya memenuhi tahapan *forming* atau tahap menempatkan diri dengan orang lain, serta mempelajari bagaimana respon saat dirinya dan individu lain saling berinteraksi, *storming* atau munculnya konflik karena masalah kepemimpinan, tujuan, perilaku interpersonal, Sementara itu, tidak terjalankan dengan baik tahap *norming* atau tahapan belajar bekerjasama, mengembangkan informasi dan respon balik mulai dilontarkan secara aktif. Serta tidak *performing* atau tidak tampak adanya pengaplikasian kerjasama yang efektif dalam menjalankan tugas. Hal ini disebabkan komunikasi antara partai lokal dengan partai nasional terbatas, sedangkan partai nasional tidak akan memasukkan diri untuk melakukan komunikasi terhadap hal-hal atau kebijakan yang berskala lokal. Sebaliknya, partai lokal akan menarik diri untuk membahas persoalan dengan ruang lingkup nasional. Akibatnya, diantara kedua kelompok partai tersebut kurang menimbulkan kepekaan, kurang menunjukkan solidaritas, kurang adanya keterbukaan dan kurang kerjasama.

2. Hambatan komunikasi yang terjadi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sehingga menyebabkan konflik serta hidupnya dua kubu partai yang saling menunjukkan eksistensi dan kekuatannya masing-masing (kubu partai lokal dan kubu partai nasional). Perbedaan kelompok partai yang ada dipahami oleh masing-masing orang sebagai bentuk kompetisi bukan sebagai koalisi yang berpikir untuk membangun Aceh secara bersama. Masing-masing dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merasa benar dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lain yang berlainan kelompok, atau disebut dengan pandangan apriori. Seperti yang diungkap oleh informan dalam penelitian ini, setiap kebijakan atau persoalan yang diperjuangkan oleh partai lokal akan didengar namun partai lokal mengaku bahwa partai nasional tidak mau menindak lanjuti persoalan mereka yang condong mengandung isu lokal. Karena perlakuan tersebut, partai lokal pun melakukan hal yang sama dengan tetap memperjuangkan isu lokal dan mengesampingkan isu-isu nasional, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai lokal merasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai nasional tidak mau membantu perjuangan mereka. Kondisi seperti ini terus dipertahankan dalam setiap periode pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hambatan ini disebut dengan hambatan perilaku.

5.2. Saran

5.1.1. Saran Teoritis

1. Penelitian ini memberi kontribusi untuk penelitian di bidang komunikasi politik.
2. Penelitian ini menambah referensi mengenai dinamika komunikasi antara partai nasional dan partai lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

5.1.2. Saran Akademis

Penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai dinamika komunikasi antara partai politik nasional.

5.1.3. Saran Praktis

1. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari kelompok partai nasional maupun kelompok partai lokal harus menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, untuk berbenah dan mengembalikan peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada asas, fungsi dan tujuannya.
2. Kedua kelompok partai harus saling memahami. Dimana kelompok partai nasional harus memahami sejarah MoU Helsinki Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan UU PA No. 11 Tahun 2006, tentang tujuan didirikannya partai politik lokal, serta mendukung kebijakan positif yang diusung oleh partai lokal. Sementara itu, partai lokal juga harus membuka ruang bagi partai nasional untuk diskusi dan jalan bersama melakukan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

3. Adanya tujuan yang sama (yaitu untuk membangun Aceh lebih baik dan mensejahterakan rakyat Aceh) dari dua kelompok partai di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dapat menjadi titik temu agar kedua kelompok partai lebih jeli melihat konisi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini untuk mencegah agar, persoalan yang tengah terjadi di masyarakat dapat disuarakan di gedung dewan dan diberikan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, Hamid. 2008a. *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki, Centre For Strategic and International Studies.*
- Bailusy, Muh. 2015. *Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik Oleh Muhammad Kausar Bailusy.* 2015. Jurnal The Politics, Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Vol.1 No.2 Juli.
- Bhakti, Ikrar Nusa (Ed). 2008. *Beranda Perdamaian: Aceh 3 Tahun Pasca MoU Helsinki.* Jakarta & Yogya: P2P LIPI & Pustaka Pelajar.
- Eko, Harry Susanto. 2010. *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Edisi. I.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hamid Farhan Ahmad. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh.* Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Harmaini, Dede Fitriana dkk. 2016. *Psikologi Kelompok Divisi Buku Perguruan Tinggi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbiansyah, Khotimah Ema, dkk. 2014. *Dinamika Komunikasi Dan Budaya Transparansi Partai Politik: Kasus PKS.* Seminar Nasional Komunikasi. Jaarta. ISBN: 978-602-14699-0-3.
- Kadir, A. Gau, 2014. *Dinamika Partai Politik di Indonesia.* Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 Juli 2
- Khanoris, Wahyu. 2015. *Dinamika Komunikasi Politik Konferda DPD Pdi Perjuangan Jawa Barat (Studi Kasus Mengenai Komunikasi Politik Calon Ketua Termuda Dalam Konferda DPD Perjuangan Jawa Barat Peiode 205-2020).* Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia.
- Kholil, Muhammad dkk. 2016. *Dinamika komunikasi politik di kaskus pada periode kampanye pemilihan presiden 5 Juni-5 Juli 2014. (studi pada aktivitas kaskuser dalam pemilihan Presiden 2014).* Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Tahun XXVI, No. 2 Agustus.
- Mayrudin, Yeby. 2017. *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi, Studi Tentang Pergeseran Positoning Ideologi Partai Partai Politik Peserta Pemilu 2014.* Journal of Governance. Volume 2 No. 2 Bulan Desember.
- Modusaceh.co. 2017. *Wagub Aceh dinilai memancing keadaan, Abdullah Salh: Kenapa Nova Iriansyah Menyerang DPRA.* Aceh:

<https://modusaceh.co/news/abdullah-saleh-kenapa-nova-iriansyah-menyerang-dpra/index.html>. 20 Agustus.

- Muhtadi, Saeful Asep. *Dinamika Islam Politik Pascaorde Baru Perspektif Komunikasi Politik*. Jurnal Mimbar: Volume XXI No. 2 April –Juni 2005
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. XIV*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Lembaran RI Taun 2006 Nomor 62*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, KPU. 2020. *Hasil Perolehan Suara Legislatif Wilayah Pemilihan Provinsi Aceh*. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/>.
- Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sekretaris Daerah Aceh. 2016. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh: Tata Tertib Dewa Perwakilan Rakyat Aceh*. Banda Aceh, Nomor 1.
- Serambi Indonesia. 2019. *Sudah Tiga Tahun Dibatalkan Qnun Bendera, Mengapa Pemerintah Tak Mengumumkan*. <https://aceh.tribunnews.com/2019/08/02/sudah-tiga-tahun-dibatalkan-qanun-bendera-mengapa-pemerintah-tak-mengumumkan>
- Serambi Indonesia. 2020. *Rapat Paripurna Alat Kelengkapan DPRA Ricuh, Pimpinan Skor Sidang Hingga Batas Yang Tak Ditentukan*. Aceh: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/rapat-paripurna-alat-kelengkapan-dpra-ricuh-pimpinan-skor-sidang-hingga-batas-yang-tak-ditentukan/>.
- Situmorang, Tigor. 2016. *Dinamika Politik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Penentuan Kandidat Calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015*. Jurnal politik Muda. Vol. 5 No. 3, Agustus-September.
- Susanto, Eko Harry. 2013. *Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember, Hlm 163-172
- Tim Redaksi. 2013. *Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tisnawati, Ernie, dkk. 2002. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widyaanda, Rhandika. 2017. Skripsi: *Dinamika Komunikasi Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar*. Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN I

Nama Narasumber : Drs. H. Abdurrahman Ahmad
Usia : 57
Jabatan : Ketua Fraksi Partai Gerindra
Lokasi Wawancara : Banda Aceh
Waktu Wawancara : 22 Januari 2020

1. Apakah anda sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesama anggota dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik partai lokal maupun nasional?
Sering. Karena kalau ada hal yang didiskusikan, tentu harus kita bahas bersama. Dan kita juga bagian dari Anggota Dewan. Komunikasi mutlak harus kita lakukan. kalau tidak, tidak mungkin kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dewan. Apalagi, di DPR ada komisi, komisi itu tergabung dalam berbagai macam partai politik.
2. Bagaimana hubungan komunikasi antara anda sebagai bagian dari partai nasional dengan anggota dewan lainnya dari lokal?
Ya, kita terus berkomunikasi. Dan selama ini komunikasi itu tidak ada hambatan apa-apa. Hanya saja mungkin ada beda tekanannya. Partai lokal, kita komunikasi mereka lebih tertarik kita berbicara persoalan-persoalan ke Aceh, persoalan-persoalan Aceh secara khusus. Kalau bicara nasional, mungkin hal kekhususan itu tidak menarik. Jadi, kita lebih bersifat ke umum, bukan lokal. Meskipun lokal kita bicarakan. Karena walaupun nasional, yang duduk orang Aceh. Namun demikian, kelihatannya, bagi partai nasional isu-isu khusus itu ke pusat kurang menarik. Jadi, isu-isu yang didiskusikan bersifat nasional. kandungan lokal lebih menarik, lebih nyambung dan lebih cair diskusi kalau kita angkat isu-isu kekhususan Aceh. Namun, selama ini diskusi kita tidak ada hambatan.
3. Apakah ada tarik menarik antara partai lokal dan partai nasional?
Ketika membicarakan isu-isu khusus itu ada. Kalau bicara isu khusus Aceh, partai lokal lebih fokus masalah itu. Ada kalanya nasional tidak menarik. Contoh ketika berbicara masalah bendera, kalau partai nasional tidak begitu menarik, tapi lokal satu-satunya yang harus diperjuangkan. Seperti hal lainnya, seperti masalah keuangan, sama-sama mendukung Tapi kalau masalah lebih khusus kewenangan lebih hidup dan lebih menarik dibahas partai lokal.

4. Artinya, perbedaan kelompok partai membatasi komunikasi diantara anggota DPR Aceh?
Tidak membatasi, tetap berkomunikasi. Hanya saja, penekanan dari pembahasannya yang berbeda.
5. Apakah komunikasi dilakukan secara tatap muka?
Tatap muka lebih sering. Kalau dalam rapat-rapat kita lebih tatap muka. Kalau beda pendapat sering terjadi tapi tidak sampai terjadi silang pendapat yang tajam.
6. Sering ribut dengan partai lokal?
Secara kepartaian, secara fraksi tidak sampai ribut. Tapi kalau beda pendapat ada. Tapi itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi lembaga politik seperti ini. Tapi sampai ribut-ribut, tidak. Masih bisa dinetralisir. Seperti bahas bendera. Kalau partai lokal menginginkan seperti itu. Kalau partai nasional, harus ada ruang diskusi, tapi *gak* ribut.
7. Bagaimana komunikasi anda jalin terhadap para pemimpin di pemerintahan Aceh?
Secara fraksi baik. Tidak ada masalah. Sering kita duduk-duduk dengan pemerintah dalam hal pembangunan. Meskipun mungkin yang kita diskusikan tidak semuanya jalan. Tapi walaupun tidak dikasih, ya *gak* masalah. Apakah soal yang kita diskusikan jalan diaplikasi oleh eksekutif, ya tidak semuanya.
8. Apakah anda sering melakukan komunikasi dengan para konsituen anda?
Ada, selalu berkomunikasi dengan konsistuen kita mendengarkan keluhan mereka. Kita beri jalan keluar. Kalau belum bisa diberi solusi, saya tampung dulu.
9. Dengan bentuk seperti apa komunikasi dilakukan?
Melalui telepon, duduk-duduk. Kadang ada silaturahmi sambil minum kopi. Tapi yang paling khusus, kita lakukan dengan reses. Sambil kita mengunjungi daerah pemilihan kita, juga diskusi dengan konsistuen daerah pemilihan kita. Dalam pertemuan itu, konsituen kita sering mengemukakan pendapat dan itu kita catat.
10. Apa yang anda komunikasikan terhadap konsituen anda?
Lebih kepada kebutuhan konsistuen. Setelah kita terpilih kan banyak harapan dari kita yang mereka harapkan. Terutama menyangkut persoalan-persoalan kehidupan mereka. Banyak yang sifatnya usaha, mereka minta dibantu modal kerja, masyarakat yang belum kerja minta dibuka lapangan kerja, petani minta kebutuhan petai. Jadi lebih banyak minta kebutuhan-

kebutuhan mereka. Dan kalau di sini mereka juga minta program, minta kegiatan, mungkin minta dimasukkan kerja. Itu tidak semuanya kita selesaikan, tapi tetap kita tampung.

11. Dalam merumuskan sebuah kebijakan apakah anda meminta pendapat dari partai lokal atau hanya dari anggota dewan partai nasional saja? Alasannya?

Tentang kebijakan itu, pertama kita lihat sifat kebijakan itu. Apakah kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat kalau keinginan masyarakat kita berusaha menolak, itu kita mengajak partai lokal, partai nasional. Yang sifatnya kebutuhan kita juga diskusikan dengan partai lokal agar bersama-sama dirumuskan dalam kebijakan daerah. Kalau sendiri tidak akan berhasil.

12. Ketika tidak adanya pemahaman atau kesepakatan dengan partai lokal apa yang anda lakukan?

Ya kalau terjadi beda terjadi ketidak sepahaman, kita akan melakukan lobi-lobi, pendekatan dengan secara pribadi. Kalau di sini kita dekati ketua fraksi, kita bisikkan ketua fraksi, kita berikan pemahaman menurut pandangan kita, dan kita juga harus mendengar pendapat dari teman yang berbeda pandangan tadi. Kalau dengan ketua fraksi belum bisa tercapai kesepakatan itu, kalau memang itu harus digolkan, harus diselesaikan maka kita akan mengajak pimpinan partai berdiskusi. Kalau di tingkat pimpinan partai belum selesai, maka kita mengarah ke pendapat mayoritas. Kalau pendapat mayoritas belum selesai, maka *voting* kebijakan. Tapi, *voting* kebijakan sampai sekarang belum terjadi.

13. Setelah anda menetapkan dan mengesahkan, baik anggaran maupun kebijakan, pengawasan seperti apa yang anda lakukan? Bentuk pengawasan yang anda lakukan seperti apa?

Dalam pengawasan, ada pergi sendiri ke daerah pemilihan yang sifatnya juga ada bersama-sama dalam bentuk komisi. Kunjungan kerja komisi yang tergabung dalam fraksi. Kalau krusial dan penting ditindaklanjuti secara mendalam, maka akan dibutuhkan solusi termasuk juga bergabung partai lokal dan nasional. Biasa melalui rapat kerja, kunjungan kerja, pansus, kunjungan kerja individu, di samping itu mengawasi program pembangunan yang sedang maupun yang telah dilakukan.

14. Apakah pengawasan yang dilakukan melibatkan anggota DPR Aceh dari partai politik lokal?

Sesuai fungsinya, pengawasan yang dilakukan menjadi tanggungjawab dari seluruh anggota DPR Aceh. Semuanya harus terlibat. Karena kalau melakukan pengawasan tidak secara individu, tapi terkadang secara komisi yang disitu ada anggota DPR Aceh dari partai-partai lain.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN II

Nama Narasumber : Zainal Abidin S.Si
Usia : 40
Jabatan : Ketua Fraksi PKS
Lokasi Wawancara : Banda Aceh
Waktu Wawancara : 22 Januari 2020

1. Apakah anda sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesama anggota dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik dari partai lokal maupun nasional?
Ya, ini sebuah kegiatan rutin kita interaksi dan berkomunikasi. Yang dibicarakan berkenaan dengan apa namanya, yaitu kepentingan masyarakat. Insya Allah ini akan terus dilanjutkan memang. Karena itu penting. Baik partai lokal maupun nasional. Bersinergi malah.
2. Bagaimana hubungan komunikasi antara anda sebagai bagian dari partai nasional dengan anggota dewan lainnya dari lokal?
Hubungan komunikasi kita baik-baik saja. Berjalan dengan lancar, itu tadi, karena memang kita sangat membutuhkan keberadaan kawan-kawan baik itu dari partai lokal maupun nasional. Kalau kawan-kawan dari partai nasional, ya ini kan sering kita dapatkan isu-isu yang bersifat nasional. Terlebih lagi kita memiliki *channel* di Jakarta. Kalau dengan partai lokal, mereka memerlukan kita karena mereka tidak memiliki cantolan di tingkat nasional. Makanya terhadap hal-hal yang kita sepakati, inilah komunikasi terus berjalan.
3. Apa yang biasa anda bahas saat melakukan komunikasi dengan anggota dewan dari partai lokal?
Inikan menyangkut Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 kalau tidak salah, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena itu menyangkut dengan kekhususan Aceh, dan inikan menjadi kepentingan kita bersama. Makanya, kita dengan partai lokal, kita mendorong pemerintah pusat bisa menepati keinginan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut. Partai lokal tadi butuh kita karena kita punya koneksi ya, punya ayah di Jakarta. Makanya ini sama-sama kita dorong agar Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini bisa berjalan, bisa terlaksana di Aceh.
4. Sering ribut tidak dengan PA?

Kalau berbeda pendapat ada, tapi kita mencoba mencari titik temu, mencari kesamaan agar dinamika ini menjadi sebuah hal yang niscaya lah. Sebuah hal yang kita dapatkan pada saat kita berkomunikasi dengan partai lokal.

5. Apakah komunikasi dilakukan secara tatap muka?
Kita tatap mukalah, baik secara formal maupun informal.
6. Apa saja yang biasa dibahas saat melakukan komunikasi dengan Anggota dewan dari partai nasional?
Yang kita bahas dari anggota dewan partai nasional ya, menyangkut hal yang menjadi tupoksi pemerintah pusat. Menyangkut infrastruktur, ekonomi dan juga menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Kita duduk dan mencoba mencari solusi. Kalau di tataran kita, di partai nasional yang di tingkat provinsi tidak selesai, kita mencoba meminta solusi dari partai tingkat pusat.
7. Bagaimana komunikasi anda jalin terhadap para pemimpin di pemerintahan Aceh?
Komunikasi ini penuh dinamika, kita pernah mengalami APBA dalam bentuk Pergub tahun 2018 pada masa awal Irwandi. Inipun terjadi padahal kita mencoba komunikasi intensif, secara baik tapi tidak ada titik temu. Ini salah satu contoh dinamika. Tapi, pada prinsipnya, kita dengan pemerintah provinsi tetap jalan.
8. Komunikasi yang anda lakukan terhadap pemerintah terkait apa?
Kita jalani saat sidang-sidang di dewan. Baik menyangkut penyusunan APBA, kemudian juga pengawasan APBA dan juga program-program legislasi harus kita jalankan. Jadi inilah bentuk komunikasi yang menjadi tupoksi kita. Di luar itu ya kita ada komunikasi di forum-forum informal.
9. Apakah anda sering melakukan komunikasi dengan para konsituen anda?
Kita yang secara formal melalui reses. Setahun 3 kali. Itu sarana yang kita jadikan komunikasi dengan konsituen. Yang kedua, saat kita kunjungan kerja ke daerah pemilihan, kita melakukan komunikasi dengan konsituen. Dan titik tertutup kemungkinan konsituen kita ini pergi ke Banda Aceh menjumpai kita. Ini semua kita bangun dengan konsituen. Jangan sampai kita melupakan jasa mereka. Kita coba melayani sesuai kemampuan kita.
10. Apakah ada permasalahan yang dikeluhkan oleh konsituen anda?
Kalau keluhan mereka banyak. Karena keinginan masyarakat sangat banyak. Kita kadang terbentuk dengan tupoksi pemerintah provinsi dan tupoksi kabupaten. Banyak keinginan masyarakat itu bersifat tupoksi kabupaten. Keinginan masyarakat lebih banyak menjadi tupoksi

pemerintah kabupaten. Kita cari jalan tengah agar kita bisa memenuhi keinginan masyarakat. Alhamdulillah, informasi yang kita dapatkan untuk tahun depan, kita di provinsi bisa mengadvokasi usulan-usulan yang bersifat keinginan masyarakat. Jadi, kalau masalah pasti ada.

11. Lalu, permasalahan tersebut anda tindak lanjuti dengan cara seperti apa?
Yang sudah kita kerjakan, yang pertama, kita kan dewan periode lalu memutuskan lima kabupaten membuat rumah sakit regional. Kenapa lahir rumah sakit regional. Karena, begitu banyaknya antrean di RS Zainal Abidin terhadap masyarakat yang berobat rujukan dari daerah. Sedangkan di RS Zainal Abidin kan kamar terbatas, ruang operasi, tenaga medis kan terbatas. Kita mencoba memotong antrean itu membangun rumah sakit regional. Khusus untuk Barat Selatan, hamdulillah kita mendapat dua kabupaten. Satu Aceh Barat, satu lagi Aceh Selatan. Harapannya, memang bangunan ini selesai dalam waktu 5 tahun. Sehingga kita dapat memangkas daftar antrean yang begitu panjang di RS Zainal Abidin. Ternyata pada saat pembangunan, pemerintah menganggarkan sangat sedikit. Padahal waktu itu, kita mencoba pemerintah punya komitmen setiap tahun menganggarkan 1 rumah sakit Rp.100 milyar. Tapi ternyata pemerintah menganggarkan di bawah itu. Itu salah satu contoh. Begitupun dengan masalah PJS. Banyak masyarakat yang belum tertampung di BPJS. Nah, ini kita tindaklanjuti sehingga masyarakat mendapat BPJS.
12. Dalam merumuskan sebuah kebijakan apakah anda meminta pendapat dari partai lokal atau hanya dari anggota dewan partai nasional saja? Alasannya?
Merumuskan kebijakan inikan kita harus banyak referensi, dan juga harus banyak masukan. Dan referensi atau banyak masukan tidak tertutup dari partai nasional maupun hanya dari partai lokal saja. Karena kebijakan yang akan kita buat adalah kebijakan yang akan kita pakai bersama.
13. Ketika tidak adanya pemahaman atau kesepakatan dengan partai lokal apa yang anda lakukan?
Pada prinsipnya ini hal yang wajar pada saat membuat kebijakan. Setiap kebijakan banyak interpretasinya. Nah, kita tetap mencari hal yang menjadi kesepakatan bersama. Walaupun persamaan itu sangat sedikit dari perbedaan.
14. Setelah anda menetapkan dan mengesahkan, baik anggaran maupun kebijakan, pengawasan seperti apa yang anda lakukan? Bentuk pengawasan yang anda lakukan seperti apa?
Pertama adalah pengawasan berdasarkan audit BPK, karena BPK adalah lembaga negara yang tugasnya itu. Yaitu membuat audit keuangan pemerintahan. Kedua berdasarkan laporan masyarakat, kita tindaklanjuti.

Ketiga, pengawasan berdasarkan kesepakatan bersama di lembaga ini.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN III

Nama Narasumber : Samsul Bahri (Tgk Tiyong)
Usia : 48
Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh - Ketua Umum
Partai Nanggroe Aceh
Lokasi Wawancara : Banda Aceh
Waktu Wawancara : 23 Januari 2020

1. Apakah anda sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesama anggota dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik partai lokal maupun nasional?
Sering, karena kita di Anggota DPR walaupun berbeda partai, yang pada intinya sama-sama tujuan, yaitu tujuan legislasi kepentingan Aceh, bersama pemerintah Aceh juga ada fungsi kita sebagai fungsi penganggaran untuk kepentingan masyarakat Aceh juga bersama tim penganggaran pemerintah Aceh. Juga ada fungsi pengawasan melekat pada anggota DPR, jadi kita harus saling komunikasi antara satu dengan yang lain, walau berbeda partai ketika kita maju di sana kita sama semua. Sering kita komunikasi baik formal maupun tidak formal. Karena bicara kepentingan daerah kita harus komunikasi.
2. Bagaimana hubungan komunikasi antara anda sebagai bagian dari partai lokal dengan anggota dewan lainnya dari partai nasional?
Baik, karena kita semua tidak bertanding tapi kita bersanding untuk kepentingan rakyat Aceh, baik partai lokal maupun partai nasional, anggota DPR yang terpilih sekarang adalah semua kepentingan rakyat. Ketika berbicara kepentingan rakyat, kita harus bersinergi, harus bergandeng tangan untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat yang terjadi hari ini dan ke depan juga. Berkat kerjasama kita baik partai lokal maupun partai nasional bisa apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa terakomodir.
3. Apakah komunikasi dilakukan secara tatap muka?
Ada tatap muka, ada telepon. Dimanapun, kapanpun kalau bertemu kita membahas kepentingan masyarakat Aceh.
4. Apa yang biasa anda bahas saat melakukan komunikasi dengan anggota dewan dari partai nasional?
Kita berbicara apa tanggungjawab kita untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

5. Bagaimana komunikasi anda jalin terhadap para pemimpin di pemerintahan Aceh?
Untuk sementara tidak ada hubungan sama sekali. Ini kan harus jujur. Tapi, kita kembali kepada fungsi kita. Kita adalah pendukung pemerintah, pengkritik pemerintah bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi pemerintah harus introspeksi diri. Apa yang tertuang dalam visi misi yang sekarang menjadi RPJM, itu tanggungjawab pokok yang harus diselesaikan. Walau tidak 100%, tapi setidaknya berjalan dari tahun ke tahun hingga akhir periode 5 tahun.
6. Komunikasi yang anda lakukan terhadap pemerintah terkait apa?
Mungkin mereka ada perwakilan di SKPA, ada perwakilan tim anggaran pemerintah Aceh yang mereka komunikasi langsung ke DPR. Di sana, ini pemerintah ada Sekda, ada Bappeda, ada badan keuangan, juga asisten merupakan perpanjangan Gubernur atau perpanjangan tangan pemerintah Aceh. Kita bisa berkomunikasi dan mereka bisa menyampaikan langsung ke pimpinan mereka, ini-ini yang kebutuhan yang *urgent*, dan kebutuhan-kebutuhan ini yang perlu diakomodir di dalam APBA itu sendiri.
7. Apakah anda melakukan komunikasi kepada konsistuen anda?
Tentu saja, karena konsituen adalah orang-orang yang telah mempercayai saya utuk dapat duduk di DPR Aceh ini. Mereka yang harus kita pikirkan. Karena keberadaan kami di DPR Aceh ini untuk mereka, sebagai wakil rakyat.
8. Bagaimana cara anda melakukan komunikasi dengan konsituen anda?
Tatap muka, melalui media massa atau media sosial?
Ada komunikasi ketika pulang ke kampung, ada reses, ada pansus, kita juga kumpul konsistuen, dan kita di sini karena konsituen. Kita juga harus komunikasi intens kepada mereka, karena mereka juga bagian daripada orang-orang yang mencari di lapangan, apa kebutuhan masyarat. Makanya kita harus intens komunikasi agar kita dapat berjalan dengan baik sebagai anggota DPR.
9. Lalu, permasalahan tersebut anda tindak lanjuti dengan cara seperti apa?
Tugas kita ketika dilantik dan disumpah, adalah wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tuga kita di DPR ini kan non teknis, kita perjuangkan, selebihnya kita serahkan kepada pemerintah yang eksekutornya, yang teknisnya. Ketika hal-hal yang penting yang memang bermanfaat kepada orang-orang banyak tidak diakomodir, kita akan memanggil SKPA-SKPA melalui Gubernur untuk duduk bersama kenapa ini tidak diakomodir, misalnya kekurangan anggaran tahun ini. Bagaimana tahun selanjutnya. Yang penting kita harus memperjuangkan. Kita bukan

dinas pelaksana, dinas tekins, jadi pelaksanaan teknisnya bukan wewenang kita.

10. Dengan adanya perbedaan antara partai politik lokal dengan partai politik nasional, berpengaruh terhadap pemahaman atau kesepakatan dalam penentuan kebijakan di DPR Aceh?

Ya, tentu saja. Karena adanya perbedaan antara partai politik lokal sama partai politik nasional ini, tentu saja membawa perbedaan pandangan dari masing-masing partai.

11. Ketika tidak adanya pemahaman atau kesepakatan dengan partai nasional apa yang anda lakukan?

Prinsip saya, perbedaan pandangan itu adalah kebersamaan. Kita menghormati kebersamaan, kita juga menghormati perbedaan pandangan untuk mencapai kesempurnaan. Ini dalam politik kadang-kadang tidak bicara aturan. Kalau bicara aturan, tidak ada bicara negosiasi. Kadang-kadang kebijakan politik hari ini tidak sesuai dengan naluri saya, kehendak saya. Tapi ketika ini kepentingan mayoritas kita, kita juga harus ikuti, harus legowo, harus berbesar hati. Berarti inilah keputusan kita, karena sistem parlemen, dia sistem demokrasi, ada keputusan mayoritas dan masalah minoritas. Apa yang diputuskan mayoritas, itulah keputusan bersama.

12. Setelah anda menetapkan dan mengesahkan, baik anggaran maupun kebijakan, pengawasan seperti apa yang anda lakukan? Bentuk pengawasan yang anda lakukan seperti apa?

Fungsi kita adalah fungsi pengawasan DPR. Setiap rupiah yang telah kita sahkan bersama pemerintah Aceh harus dipastikan berjalan sesuai aturannya. Itu yang perlu kita kawal. Yang kedua pengawasan kita adalah, hari ini dalam sistem pembahasan ada kepentingan orang lebih banyak di antara orang banyak. Misalnya, ada satu irigasi yang dibutuhkan adalah 20.000 Ha lahan kita prioritisasikan dahulu ketimbang kebutuhan 200-300 Ha. Ketika pemerintah tidak mengakomodir hal itu, itu tugas kita sebagai pengawas untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah, terus berkomunikasi dengan elemen-elemen lain agar program-program prioritas itu harus diprioritisasikan pemerintah.

13. Apakah anda mengajak orang dari partai nasional untuk melakukan pengawasan bersama?

Itu harus bersama. Karena semua anggota DPR memiliki hak yang sama untuk melakukan pengawasan.

14. Apa hasil pengawasan yang anda lakukan?

Kita bawa kebiasaan rapat di paripurna, hal-hal yang belum terakomodir oleh pemerintah kita sampaikan, kita surati, kita sampaikan secara lisan agar pemerintah bisa intropeksi diri dalam hal-hal apa yang kita kawal hari ini ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN IV

Nama Narasumber : Tgk Tarmizi (Tgk Panyang)
Usia : 42
Jabatan : Ketua Fraksi Partai Aceh
Lokasi Wawancara : Banda Aceh
Waktu Wawancara : 29 Januari 2020

1. Apakah anda sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesama anggota dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh?

Pada awalnya setelah perdamaian Aceh secara umum dan setelah lahirnya parti lokal di Aceh, kita berharap secara umum pimpinan-pimpinan partai komunikasi ini untuk lebih baik dan lebih mengarah membicarakan rakyat Aceh. Kedua, pimpinan-pimpinan partai nasional dan partai lokal ini pastinya ketika berbicara Aceh ini berbicara Aceh parti untuk kepentingan Aceh, tidak ada hanya untuk kepentingan partai lokal atau PA secara umum. Jadi bagaimana komunikasi anda dengan partai nasional, saya sendiri setelah masuk politik dari tahun pertama, periode pertama dan periode kedua. Sebenarnya tidak ada beda bagi saya untuk memikirkan dan untuk membicarakan kepentingan-kepentingan Aceh di dalam lembaga DPR Aceh dan lembaga pemerintahan Aceh. Ini pada dasarnya begini, karena di partai nasional pun a.. yang di lokal atau yang di Aceh sini adalah orang Aceh juga yang menduduki posisi legislatif ataupun eksekutif. Artinya, ketika membicarakan hal Aceh, kita berharap dan saya berharap tidak seolah-olah bebannya partai Aceh. Jadi, ini harus ke semua partai nasional, atau pimpinannya atau anggotanya yang menduduki di kursi legislatif baik di DPR Kota maupun provinsi ini harus ada sebenarnya jiwa ke Acehannya, untuk menyelesaikan masalah Aceh yang sudah diambang pintu menuju kesejahteraan secara umum. Baik itu pendidikan, infrastruktur dan ideologi dan sebagainya. Itu menurut saya tentang komunikasi . kalau saya pribadi ya memang tidak pandang bulu. Karena partai nasional ini juga berhak dan harus berbicara dan mementingkan masalah Aceh. Jadi, pascakonflik dan pascadamai ini Aceh ketika maju atau tidak majunya, sejahtera atau tidak sejahteranya Aceh kita yang melihat dan merasakannya sendiri.

2. Berarti kesimpulannya, partai di Aceh mau tidak mau harus berbicara kemashlahatan rakyat Aceh sesuai dengan yang diinginkan oleh partai Aceh?

Sebenarnya begitu, Karena partai nasional ini yang lebih tua di Indonesia secara umum dan secara khususnya memang lebih duluan ada partai

nasional di Aceh. Namun, secara legislatifnya, memang orang Aceh semua. Jadi, tidak ada asingnya membicarakan masalah Aceh.

3. Bagaimana komunikasi anda dengan pemerintah Aceh?
Tidak jauh berbeda gambarannya. Kalau pemerintahnya dipimpin oleh orang dari partai nasional, maka pertentangan juga terjadi. Selalu ada yang tidak sejalan. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga orang Aceh. Tapi tidak mau untuk bersama-sama menegakkan lagi nilai-nilai lokal yang memang harusnya ada di Aceh.
4. Sebagai partai lokal yang meraup suara terbanyak atau mewakili masyarakat Aceh, apakah dengan ini mempengaruhi sebuah kebijakan di Aceh?
Kalau untuk mempengaruhi, ada pengaruhnya memang seolah-olah tidak bisa ada ayam jago di Aceh, kalau kita bicara pengaruh. Tapi sebenarnya, kita bilang penaruh ya pengaruh. Dengan adanya partai lokal dan juga adanya partai nasional ini, seperti kita bilang tadi memang kebersamaan dan bersama untuk memikirkan masalah Aceh. Tapi ketika partai nasionalnya ada, bila memang mereka membuang badan kepentingan Aceh, di situlah pengaruhnya. Menurut saya begitu. Karena ketika membedakan ini Aceh urusan PA saja. Kami tidak ada urusan. Itu pengaruh. Tapi kalau berbicara bersama untuk memikirkan masalah Aceh apapun judulnya, kesejahteraan, atau pembangunan, sebagainya ketika bersama tidak ada pengaruh. Artinya kebersamaan mengatasmakan orang Aceh, rakyat Aceh, dan legislatif Aceh walaupun di partai nasional.
5. Jadi harus kita paksa untuk memikirkan rakyat Aceh?
Tidak harus memaksa. Tapi kesadaran, bahwa Aceh milik bersama.
6. Bagaimana komunikasi anda kepada konsistuen?
Tetap terjalin. Kami selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya selalu turun, baik dalam reses, kunjungan kerja atau menerima mereka langsung di DPR Aceh untuk rapat dengar pendapat.
7. Meskipun memiliki suara terbanyak dalam pemilu, tidak semua partai setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PA. Seperti bendera misalkan, ada Undang-Undang PA yang belum terealisasi. Apa yang dilakukan oleh PA?
Sebenarnya beginilah lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya. Karena, ketika ini lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya dengan adanya partai nasional di Aceh. Sebenarnya, kita berharap semua partai nasional mendukung keputusan yang ada di partai Aceh. Jadi, ketika kursi periode ketiga ini, dari 32, 29, tinggal 18 ini pengaruh memang. Jadi, di sinilah kita berharap, di parlemen partai aceh lebih 50:51 untuk menyelesaikan

hal-hal kepentingan Aceh dalam berkaitan politik ataupun hal-hal lainnya. Jadi ketika partai nasional tidak mendukung apa keputusan PA, jadi partai Aceh bisa mengambil keputusan dalam paripurna, ketika parlemen dikuasai 50:51. Dari sini memang lahir pengaruh atau tidak pengaruhnya. Kita melakukan ini untuk memberi pemahaman. Sebenarnya mengerti sudah mengerti, malah mereka lebih mengerti daripada kita. Cuma setuju atau tidaknya mereka. Di sinilah lahir pengaruh tidak pengaruhnya. Tapi kebersamaan harus diutamakan, pemahaman Aceh sudah mereka tahu. Gimana Aceh sebenarnya, dan gimana semasa Iskandar muda, gimana sebelumnya dan gimana sekarang. Apa maksud PA apa maksud perjuangan Aceh di sinilah. Kita mengulang ke belakang, yang merasakan imbasnya, bukan orang GAM, dan bukan orang PA tapi masyarakat Aceh secara umum.

8. Artinya ketika PA atau partai lokal ingin menyampaikan gagasan atau terkait isu lokal, saat ini terjadi ketidaksepemahaman?
Ya, faktanya begitu. Kalau ada isu lokal yang diperjuangkan, partai nasional pasti tidak mendukung. Mereka pura-pura saja tidak tahu maksud perjuangan tersebut. Padahal, mereka sebenarnya tahu ke arah mana perjuangan yang dilakukan. Ini semua untuk masyarakat Aceh nantinya, bukan PA, bukan GAM.
9. Ketika tidak sependapat, pernah sampai bentrok tidak antara partai lokal dengan partai nasional?
Di dalam parlemen ataupun di dalam internal lainnya, mengarah ke bentrok tidak kita inginkan. Tapi pemahaman ini dari media, dari orang tua atau tokoh lainnya, tahu persislah masalah Aceh sebenarnya. Jadi, pernah bentrok, tidak pernah memang. Dan kita tidak berharap hal ini terjadi. Tetapi ketika mereka agak asing ketika membicarakan masalah Aceh, agak merasa tidak memiliki, ini seharusnya kita harus melakukan yang memaksa. Di sini harus. Karena ketika membicarakan masalah Aceh dan kesejahteraan dan sebagainya, itulah dibilang tadi bukan hanya tanggungjawab PA saja. Ini kepentingan bersama.
10. Sering hal tersebut terjadi?
Paling-paling dalam paripurna kalau di lembaga, kalau secara personal adu argumen ada. Kalau secara fisik tidak ada. Tapi dalam paripurna kita harus memberi pemahaman setiap instruksi bahwa Aceh milik kita Aceh. Bukan milik partai Aceh, tetapi siapapun yang menduduki dalam pemerintah dan legislatif berhak memikirkan kepentingan Aceh.

11. Apa langkah yang dilakukan untuk meredakan ketidak kondusifan keadaan pasca tidak sepaham?

Itu kan ada dua porsi. Kalau di internal pastinya kita merujuk pimpinan atau panglima, kalau di internal PA. kalau di lembaga, pastinya kita berharap pimpinan partai lokal dan nasional berembuk dan mencari solusi apa permasalahan ketika ada keributan dan apa masalah pembahasan di DPR Aceh untuk menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan Aceh lainnya. Jadi, di sini harus dilibatkan ketua pimpinan partai baik lokal maupun nasional, bila ada kesalahpahaman kepentingan politik secara lembaga.

12. Mengenai persoalan bendera inikan ada kesan seolah-olah PA yang menginginkan. Sementara partai nasional sendiri cuek untuk memperjuang. Apa langkah yang diambil oleh PA?

Kita tetap langkah lembaga dan langkah pimpinan partai. Itulah, sbenarnya pemahaman ini harus diakui. Memang sudahh paham, tapi jangan takut dengan pimpinan di pusat. Ini bukan lambang PA. tapi, ini simbol Aceh. Ketika membicarakan kepentingan bendera Aceh ini mereka ataupun partai nasional yang ada di Aceh mendukung saja apa keputusan Partai Aceh untuk menyelesaikan bendera Aceh dan lain-lain, butir-butir MoU TNI dengan GAM tempo lalu. Jadi, ketika bicara kepentingan, bendera dan butir MoU lainnya diharap kebersamaan antara partai lokal dan harus didukung oleh partai nasional. Harus dipaksa. Sebenarnya mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu.

13. Apa hambatan komunikasi dengan partai nasional?

Hambatannya tidak nampak. Yang kita tahu, ada dua lembaga di Aceh. Eksekutif dan legislatif. Dari sinilah, jangan terjadi salah paham dan masing-masing kepentingan di sini, masalah anggaran dan sebagainya. Jangan nampakkan di publik bahwa nasional dan lokal. Ketika berjalan bersama menjalankan sebagai fungsi masing-masing, kita dua lembaga ini menjadi satu, pasti segala urusan keAcehannya lancar seperti politik, butir-butir perjanjian kayak dibilang tadi masalah bendera, masalah anggaran sekarang juga. Karena kita memikirkan masalah Aceh dalam segi manapun, dalam segi apapun. Jadi, untuk penghambat tidak lahir penghambat. Seperti kita bilang, bahwa mereka lebih paham dari kita. Dari sini, kita berharap ada partai nasional di Aceh untuk Acehlah. Walaupun kepemimpinan dasarnya ada di pusat. Saya berharap semua partai politik nasional dan lokal di Aceh, yang sudah menduduki lembaga DPR Aceh saya berharap. Di paripurna pun saya beri pemahaman bahwa Aceh milik bersama, bukan milik GAM, bukan milik PA. Ketika itu kita utarakan, bukan hanya satu hal saja, masalah anggaran, tapi juga masalah politik. Jakarta sekarang sudah memberi hak untuk kita di sini bagaimana mengurus diri sendiri. Tapi harusnya mengharap dari semua partai

nasional yang dari Aceh dan tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta. Itulah namanya satu payung. Satu hal lagi yang penting adalah masalah Wali Nanggroe. Masalah anggaran Rp.35 milyar besar, itu tidak besar. Malah lebih sedikit. Karena lembaga Wali Naggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini sudahh diistimewakan untuk Aceh, untuk mengistimewakan masyarakat Aceh, bukan hanya GAM.

14. Fungsi Wali Nanggroe untuk apa?

Memang secara adat istiadat dan secara hukum yang di Aceh ini kita tidak setarakan. Cuma fungsi sudah disahkan ditingkat nasional. Bukan hanya untuk penyejuk-penyejuk orang kawin saja, malah kembali Naggroe Aceh ini kembali ke ulama nanti. Sama di bawah Wali Naggroe. Tapi inikan masa transisi. Berharap, jangan ada yang meremehkan.

Pernyataan Wagub Aceh Dinilai Memancing Keadaan

Abdullah Saleh: Kenapa Nova Iriansyah Menyerang DPRA?

15:28 WIB, 20 Agustus 2017

Tweet Ikuti Suka 0 Bagikan Barikan 0



dok. MODUSACEH.CO

Penulis
Muhammad Shaleh

Rubrik
Politik, Aceh

Banda Aceh | Belum sampai seratus hari berkuasa, pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, dinilai sejumlah politisi di Aceh, khususnya Partai Aceh (PA), telah mengusik iklim harmoni yang mulai kondusif pasca Pilkada Aceh Serentak, 15 Februari 2017 lalu.

Penilaian tersebut disampaikan terkait pernyataan Wagub Aceh Nova Iriansyah; Kita Selalu Dihempang di DPRA, yang diwartakan Harian *Serambi Indonesia*, edisi Minggu, 20 Agustus 2017. Tak sampai satu kali 24 jam, pernyataan ini langsung mendapat reaksi dari politisi di DPR Aceh, khususnya Partai Aceh.

Kata Wagub Aceh, "Karena sudah mulai ada gejala kita selalu dihempang di DPRA. Sudah mulai ada gejala, *single majority* itu digunakan untuk

Berita Populer



Lakukan Klarifikasi Tokoh Bintang Dua Sunda Empire Aceh Datangi Polres Bener Meriah



Terkait Wabah Virus Corona, Ini Kata Kadinkes Bireuen



Pemilihan Pimpinan AKD DPRA Periode 2019-2024 Rampung Azhar Abdurrahman Dipercaya Ketua Banleg



Terkait Video Viral Kekerasan Anak Kapolsek Kuta Alam, Iptu Miftahuda: Kejadian Sudah Lama, Pelaku dan Korban di T2P2



Coba Kelabui Petugas, Dua Pongedar Narkoba Dibekuk

Pernyataan Wagub Aceh Dinilai Memancing Keadaan, Abdullah Saleh: Kenapa Nova Iriansyah Menyerang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. <https://modusaceh.co/news/abdullah-saleh-kenapa-nova-iriansyah-menyerang-dewan-perwakilan-rakyat-aceh/index.html>. (modusaceh.co, 20 Agustus 2019)

DOKUMENTASI

Peneliti sedang mewawancarai Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Drs. H. Abdurrahman Ahmad, pada hari Rabu, 22 Januari 2020 di Banda Aceh.



DOKUMENTASI

Peneliti sedang mewawancarai Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zainal Abidin S.Si, pada hari Rabu, 22 Januari 2020 di Banda Aceh.



DOKUMENTASI

Peneliti sedang mewawancarai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sekaligus Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh, Samsul Bahri (Tgk Tiyong), pada hari Kamis, 23 Januari 2020 di Banda Aceh.



DOKUMENTASI

Peneliti sedang mewawancarai Ketua Fraksi Partai Aceh, Tgk Tarmizi (Tgk Panyang), pada hari Rabu, 29 Januari 2020 di Banda Aceh.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Jum'at, tgl.28 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : IRPANNUSIR
NPM : 1820040025P
Prog.Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK
LOKAL DAN PARTAI POLITIK NASIONAL DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : 

Pembimbing II :

Penguji I :

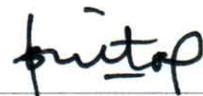
Penguji II :

Penguji III :

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Dr. Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Si.
Pembimbing I
- 2 Hj. RAHMANITA GINTING, M.Sc., Ph.D
Pembimbing II
- 3 Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
Penguji I
- 4 Dr. YAN HENDRA, M.Si.
Penguji II
- 5 Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.
Penguji III





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 31...../II.3-AU/UMSU- PPs/F/2020
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 16 Jumadil Awal 1441 H
11 Januari 2020 M

Kepada Yth : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
ACEH
di,
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam bidang penelitian, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **IRPANNUSIR**
NPM : 1820040025P
Prodi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : DINAMIKA KOMUNIKASI ANTARA PARTAI POLITIK LOKAL DAN PARTAI POLITIK NASIONAL DI DPR ACEH.

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

An Direktur,
Sekretaris

Drs. JUNAINA ALSA, Apt., M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor II UMSU



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh, Telp/Fax (0651) 21638
Banda Aceh – 23121, E-mail: dpraceh@gmail.com

Banda Aceh, 03 Februari 2020

Nomor : 070 / 281
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : Izin Riset

Yang Terhormat,

Ketua Program Studi Magister Ilmu
Komunikasi Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -

Medan

Dengan Hormat,

1. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Saudara Nomor 31/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020 tanggal 11 Januari 2020 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1441 H perihal Mohon Izin Riset mahasiswa atas nama :

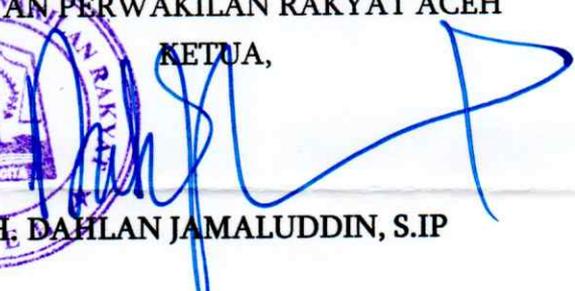
Nama : IRPANNUSIR

NPM : 1820040025P

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Judul Tesis : Dinamika Komunikasi antara Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di DPR Aceh.

2. Berknaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami berikan izin untuk melakukan riset di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP

Tembusan:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Mahasiswa an. Irpannusir.

BIODATA PENELITIAN



Data Pribadi

Nama Lengkap : Irpannusir Rasman
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 14 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hobi : Membaca
Alamat Rumah : Jl. Tgk Di Lhong I No. 195 Gp. Lhong Raya
Banda Aceh
No. Hp : 081319118229

Keluarga

Orangtua

Ayah : Rasyidin
Ibu : Sarimani

Mertua

Ayah : Ngatimin
Ibu : Roswati

Istri

: Defi Cintia Dewi, S.Km

Anak

: Givon Hari Lucky Irfan
Dayyan Al Ghafar Irfan
Balqis Rayyana Irfan

Pendidikan

SD 04 Kampung Baru
SMPN 01 Labuhanhaji
MAN Muhammadiyah Blang Pidie
S1 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
S1 FEKON Universitas Muhammadiyah Aceh
S2 MIKOM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Organisasi

Sekretaris Umum DPW PAN Aceh (2019-sekarang)
Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Jakarta (2016-2018)
Bendahara Umum KNPI Aceh (2013-2016)
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Aceh (2012-2015)
Ketua umum Pemuda Aceh Selatan (2008-2012)
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh (1999)

Karir : Anggota DPR Aceh (2019-2024)

Media Sosial
Email : irpannusir@gmail.com
Instagram : @irpannusirasman
Facebook : Irpannusir Rasman